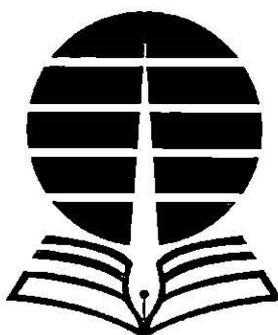


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

M. RUDI APRIANSYAH

NIM. 500633335

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRAK**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**

M. Rudi Apriansyah
mrudiapri@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 yang didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang menganut aliran *top down* yang diusung oleh George C. Edward III yang memiliki empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengambilan sampel yang dipilih dan digunakan adalah *Purposive sampling* dan *Snowball sampling*. Adapun prosedur dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara (*in depth interview*), dokumentasi dan triangulasi. Temuan penelitian ini adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai entitas pelaporan telah mengimplementasikan kebijakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam rangka penyajian laporan keuangan sejak tahun 2016 (audit laporan keuangan tahun anggaran 2015 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015) dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan menggunakan Model Pendekatan George C. Edward III.

Kata Kunci: standar akuntansi pemerintahan, basis akrual, implementasi

ABSTRACT**IMPLEMENTATION POLICY OF GOVERNMENT ACCOUNTING
STANDARDS BASED ACCRUAL IN PRESENTATION OF
FINANCIAL STATEMENTS ON GOVERNMENT OF
LUBUKLINGGAU CITY**

M. Rudi Apriansyah
mrudiapri@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The purpose of this study is to find out how the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 supported by the Regulation of the Minister of Domestic Affairs No. 64 of 2013 on the Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards At Local Government in Lubuklinggau City Government and its supporting and inhibiting factors. This research uses field research method using qualitative descriptive approach. In this research, the researcher uses a policy implementation approach approaching top down flow carried by George C. Edward III which has four variables that determine the success of a policy implementation, ie communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The sampling technique chosen and used is Purposive sampling and Snowball sampling. The procedures and techniques of data collection in this study are interviews (in depth interview), documentation and triangulation. The findings of this research are Lubuklinggau Municipal Government as reporting entity has implemented accountancy standard governmental accounting policies in order to present financial statements since 2016 (audited financial statements fiscal year 2015 for the period ended 31 December 2015) with supporting factors and inhibitors affecting The implementation of Accrual-based governmental accounting standards (SAP) policies within the Lubuklinggau Municipal Government using the George C. Edward III Approach Model.

Keywords: government accounting standards, accrual basis, implementation

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta,



Yang Menyatakan


M. Rudi Apriansyah
NIP. 500633335

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : M. Rudi Apriansyah
NIM : 500633335
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada
Pemerintah Kota Lubuklinggau

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik
Universitas Terbuka (PPS MAP-UT) pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2017
W a k t u : 13.00 – 14.30 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Tandatangan



Penguji Ahli

Prof. Dr. Aries Djaenuri. M.A



Penguji / Pembimbing TAPM

Dr. Darmanto, M.Ed



PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Penyusun TAPM: M. Rudi Apriansyah

NIM : 500633335

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Selasa / 25 Juli 2017

Menyetujui :

Pembimbing TAPM



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19601224 199001 1 001

Penguji Ahli



Prof. Dr. Aries Djaenuri. M.A

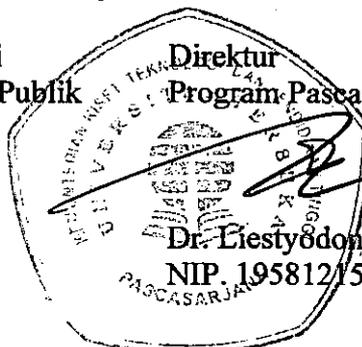
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19601224 199001 1 001

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 19581215198601 1 009

KATA PENGANTAR

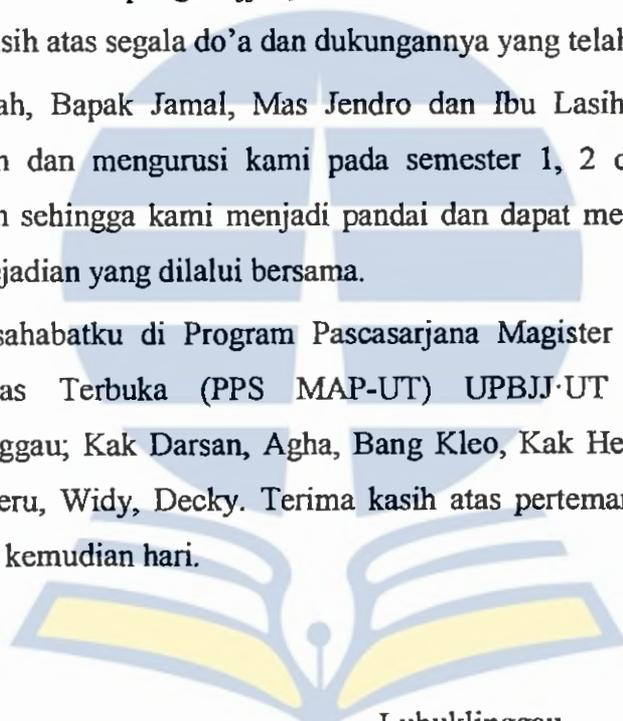
Segala Puji kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Nikmat dan TaufikNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Lubuklinggau”. TAPM ini diajukan dalam rangka menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka (PPS MAP-UT).

TAPM ini telah kami susun dengan maksimal namun kami menyadari sepenuhnya bahwa TAPM ini masih banyak kekurangan disana sini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki TAPM ini. Saran dan kritik dapat disampaikan melalui email mrudiapri@gmail.com.

Dalam penyelesaian TAPM ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

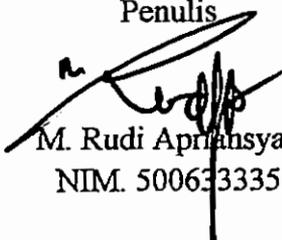
1. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka (PPS MAP-UT).
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku dosen pembimbing yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan TAPM ini.
3. Bapak Prof. Dr. Aries Djaenuri. M.A, selaku Penguji Ahli pada ujian sidang TAPM, penulis ucapkan terima kasih.
4. Bapak Drs. Jamaludin, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Palembang yang selanjutnya diteruskan oleh Bapak Ir. Adi Winata, M.Si, Pak Naim, Pak Steven Anthony, Pak Fajar, Pak Teguh, Ibu Enny, Ibu Hartati dan seluruh Pegawai di UPBJJ-UT Palembang, terima kasih atas kerjasamanya yang sangat baik dan sangat mengesankan.

5. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si, Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si, dan Dr. Andries Leonardo, S.IP., M.Si. terima kasih telah memberikan ilmunya kepada penulis dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama penulis belajar di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka (PPS MAP-UT).
6. Istriku tercinta Novita Sapta Yanti, S.Pt, anak-anakku tersayang Abang M. Doli Fikihansyah Siregar dan Adik Nabigha Rafifahansyah Siregar, *You are the best my mine.*
7. Opung Doli dan Opung Hajjah, Aki' Doli dan Uwan Doli, serta adik-adikku, terima kasih atas segala do'a dan dukungannya yang telah kalian berikan;
8. Ibu Warah, Bapak Jamal, Mas Jendro dan Ibu Lasih, terima kasih telah mengasuh dan mengurus kami pada semester 1, 2 dan 3 dengan penuh kesabaran sehingga kami menjadi pandai dan dapat mengambil hikmah dari semua kejadian yang dilalui bersama.
9. Sahabat-sahabatku di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka (PPS MAP-UT) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Lubuklinggau; Kak Darsan, Agha, Bang Kleo, Kak Hendra, Taufik, Fergus, Ichan, Heru, Widy, Decky. Terima kasih atas pertemanan kita dan semoga sukses di kemudian hari.



Lubuklinggau,

Penulis



M. Rudi Apriansyah
NIM. 500633335

RIWAYAT HIDUP

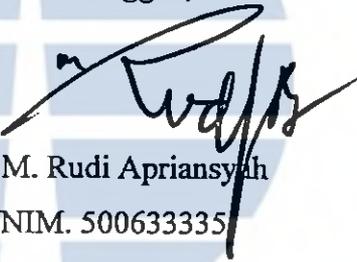
Nama : M. Rudi Apriansyah
NIM : 500633335
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 14 April 1978

Riwayat Pendidikan : 1. Lulus SD di SD Muhammadiyah I Lubuklinggau pada tahun 1990;
2. Lulus SLTP di SMP Negeri 4 Lubuklinggau pada tahun 1993;
3. Lulus SLTA di SMA Negeri 1 Lubuklinggau pada tahun 1996;
4. Lulus Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004.

Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 2005 s.d 2006 sebagai CPNSD di Pemerintah Kota Lubuklinggau
2. Tahun 2006 s.d Sekarang sebagai PNS di Pemerintah Kota Lubuklinggau;
3. Tahun 2007 s.d 2008 sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Rahma di Pemerintah Kota Lubuklinggau;
4. Tahun 2008 s.d 2009 sebagai Kasubag. Keuangan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I di Pemerintah Kota Lubuklinggau;
5. Tahun 2009 s.d 2010 sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I di Pemerintah Kota Lubuklinggau;

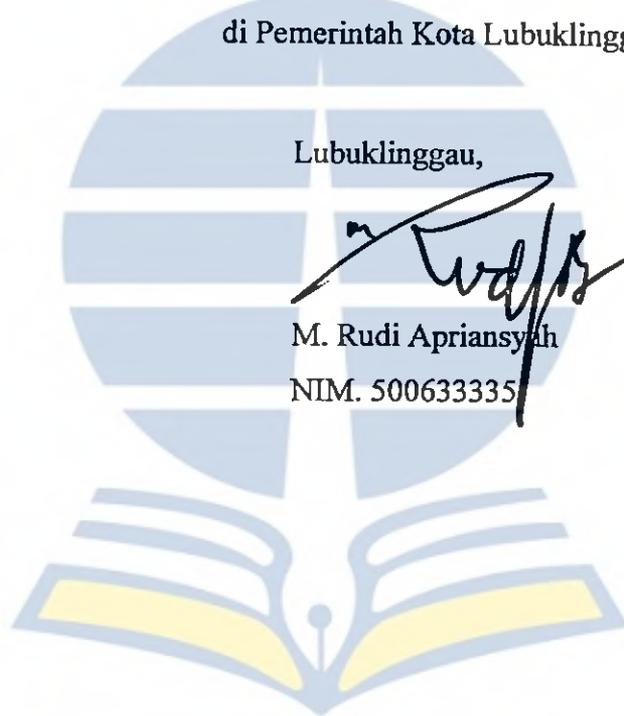
6. Tahun 2010 s.d 2012 sebagai Kasi Pelaporan Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Pemerintah Kota Lubuklinggau;
7. Tahun 2012 s.d 2017 sebagai Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan di Pemerintah Kota Lubuklinggau;
8. Tahun 2017 s.d Sekarang sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan di Pemerintah Kota Lubuklinggau

Lubuklinggau,



M. Rudi Apriansyah

NIM. 500633335



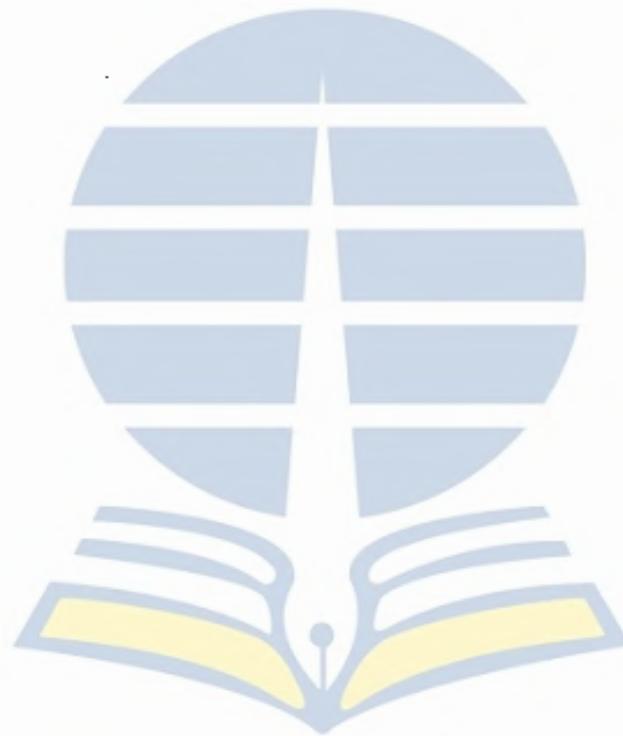
DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Abstrak	i
Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Riwayat Hidup.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	13
1. Pengertian kibijakan.....	13
2. Pengertian publik	16
3. Pengertian dan implementasi kebijakan publik.....	17
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Berpikir/ Kerangka Teoritik	42
D. Operasionalisasi Konsep	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	45
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	49
C. Instrumen Penelitian.....	50
D. Prosedur Pengumpulan Data	51
E. Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	55
B. Hasil	58
C. Pembahasan.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1.1 Data Penyampaian Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2016..... 9
2. Tabel 1.2 Data Penyampaian Laporan Keuangan BUMD dan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2016..... 10



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara Ditujukan Untuk Informan Kunci
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara Ditujukan Untuk Informan Kunci
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara Ditujukan Untuk Informan Triangulasi
- Lampiran 4. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Kunci -1
- Lampiran 5. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Kunci -2
- Lampiran 6. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Kunci -3
- Lampiran 7. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Kunci -4
- Lampiran 8. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Kunci -5
- Lampiran 9. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Triangulasi -1
- Lampiran 10. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Triangulasi -2
- Lampiran 11. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Triangulasi -3
- Lampiran 12. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Triangulasi -4
- Lampiran 13. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Triangulasi -5
- Lampiran 14. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Triangulasi -6
- Lampiran 15. Transkrip Wawancara Peneliti Dengan Informan Triangulasi -7
- Lampiran 16. Foto-Foto Pada Saat Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi administrasi sektor publik di Indonesia hingga saat sekarang ini tidak terlalu mengembirakan. Hal ini tercermin dari rendahnya kualitas pelayanan masyarakat dan maraknya praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terkait dengan pelayanan publik.

Transparansi merupakan keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan di Indonesia juga belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode lama, *output* yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Malah, segala kekurangan yang ada dalam akuntansi pemerintahan pada periode tersebut sering menjadi ladang yang subur untuk tumbuhnya praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Akuntansi pada hakekatnya adalah proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara pada pelaporan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pemakai untuk berbagai kebutuhan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas akan semakin membaik apabila didukung oleh sisten akuntansi yang

menghasilkan informasi yang tepat waktu dan tidak menyesatkan. Sebaliknya sistem akuntansi yang using, yang tidak informatif, yang tidak akurat, dan menyesatkan akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas (Simanjuntak. Binsar H, 2011:5).

Sedangkan laporan keuangan merupakan alat yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki instansi pemerintah atas transaksi-transaksi yang dilakukan dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan maka laporan keuangan pemerintah disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Laporan keuangan pemerintah juga diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2006) menyatakan bahwa dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang.

Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang

sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Akuntabilitas laporan keuangan tentunya berhubungan dengan metode penyusunan laporan keuangan. Secara umum, terdapat dua basis pencatatan akuntansi yaitu (1) Basis Kas (*Cash basic*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (2) Basis Akrual (*Full accrual*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun ada satu lagi basis akuntansi yang merupakan modifikasi bentuk antara basis kas dengan akrual yang disebut basis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual/CTA*). CTA adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual jika akan dilakukan harus dirancang secara hati-hati mengingat Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) baru saja diterbitkan dan belum diimplementasikan sepenuhnya, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Urusan pemerintahan Pemerintah Kota Lubuklinggau terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang diaplikasikan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Urusan wajib adalah urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan

yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Suatu perubahan besar yang terjadi pada bidang keuangan pemerintah pada saat ini. Perubahan yang signifikan itu adalah dibidang akuntansi pemerintahan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi perubahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah termasuk Pemerintah Kota Lubuklinggau yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual/CTA*).

Sejalan dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau pun ikut menyesuaikan. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode

maupun antar entitas. Tidak terkecuali Pemerintah Kota Lubuklinggau selaku pengelola keuangan yang menyelenggarakan akuntansi. Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah entitas pelaporan akuntansi yang juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Perbandingan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 dan setelah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam LRA pos-pos yang disajikan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual adalah sama.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang diisyaratkan oleh SAP Berbasis Akrua!. Sebelumnya SAP Berbasis Kas Menuju Akrua! tidak mengisyaratkan LPSAL disajikan oleh entitas pemerintahan.

3. Neraca

Perbandingan Neraca sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu:

- a) Pada sisi aset lancar, adanya tambahan pos penyisihan piutang dan pos belanja dibayar dimuka,
- b) Pada sisi kewajiban jangka pendek, adanya penambahan pos berupa utang belanja,

c) Pada sisi pos ekuitas, tidak disebutkan lagi Ekuitas Dana namun hanya disebutkan Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Sebelum adanya penerapan PP 71 Tahun 2010, tidak ada LO dalam penyajian laporan keuangan, namun sesudah penerapannya semua entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan LO sebagai laporan keuangan pokok.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Perbandingan LAK sebelum dan sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010 yaitu pengklasifikasian dari aktivitas arus masuk dan keluar kas. Sebelum adanya PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual mengklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Sedangkan LAK sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010 mengklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Sebelum adanya penerapan PP 71 Tahun 2010, LPE tidak diamanatkan untuk disajikan dalam laporan keuangan berbasis kas menuju akrual. Namun sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010, LPE wajib disusun dan disajikan oleh semua entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Perbandingan CaLK sebelum dan sesudah penerapan PP 71 Tahun 2010 yaitu jumlah pos yang disajikan dan penjelasan atau daftar terincinya. Sebelum penerapan PP 71 Tahun 2010, CaLK hanya menyajikan dan menjelaskan pos-pos yang terdiri dari LRA, Neraca dan LAK. Sedangkan sesudah penerapan

PP 71 Tahun 2010, pos-pos yang disajikan dan dijelaskan bertambah, yaitu meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Secara umum Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai keuangan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dijalankan.

Pada saat menggunakan akuntansi CTA laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau secara berturut-turut dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kemudian tahun 2016 (audit laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015) saat pertama kali diterapkan akuntansi berbasis akrual (*Accrual Basis*) yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Kota Lubuklinggau masih tetap mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

Namun fakta-fakta menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam rangka penerapan PP No.71 Tahun 2010 baik pada entitas pelaporan (laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau) maupun entitas akuntansi (SKPD, BLUD, dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau) antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami pengelola keuangan berbasis akrual masih rendah, hal ini dapat dilihat dari data penyampaian laporan keuangan yang disampaikan entitas akuntansi kepada entitas pelaporan yang menunjukkan laporan keuangan dibuat berdasarkan *Cash Toward Accrual* (CTA).

2. Masih kurangnya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan personil mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

PP Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan laporan keuangan disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir dan menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang penting.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2006) Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang penyampaian laporan keuangan kepada Walikota Lubuklinggau melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penyampaian Laporan Keuangan SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2016

No.	SKPD SELAKU ENTITAS AKUNTANSI	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)	
		PP NOMOR 24 TAHUN 2005 BERBASIS CASH TOWARD ACCRUAL (CTA)	PP NOMOR 71 TAHUN 2010 BERBASIS FULL ACCRUAL
1	Dinas Pendidikan	√	
2	Dinas Kesehatan	√	
3	RSUD Siti Aisyah	√	
4	Dinas Pekerjaan Umum	√	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	
6	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	√	
7	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	√	
8	Kantor Lingkungan Hidup	√	
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	√	
10	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	√	
11	Dinas Sosial	√	
12	Dinas Tenaga Kerja	√	
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pengelohan	√	
14	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	√	
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	√	
17	Satuan Polisi Pamong Praja	√	
18	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	√	
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	√	
20	Kepala Daerah	√	
21	Sekretariat Daerah	√	
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	√	
23	Inspektorat	√	
24	Dinas Pendapatan Daerah	√	
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		√
26	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BUD)		√
27	Badan Kepegawaian Daerah	√	
28	Badan Pendidikan dan Pelatihan	√	
29	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	√	
30	Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	√	
31	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	√	
32	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	√	
33	Kecamatan Lubuklinggau Barat I	√	
34	Kecamatan Lubuklinggau Barat II	√	
35	Kecamatan Lubuklinggau Utara I	√	
36	Kecamatan Lubuklinggau Utara II	√	
37	Kecamatan Lubuklinggau Timur I	√	
38	Kecamatan Lubuklinggau Timur II	√	
39	Kantor Ketahanan Pangan	√	
40	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan	√	
41	Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	√	
42	Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan,	√	
43	Dinas Perikanan dan Peternakan	√	
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	√	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Lubuklinggau

Selain SKPD yang merupakan entitas akuntansi dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau juga memuat laporan keuangan BUMD dan BLUD yang merupakan entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Tabel 1.2
Data Penyampaian Laporan Keuangan BUMD dan BLUD
di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2016

No.	BUMN DAN BLUD SELAKU ENTITAS AKUNTANSI	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)	
		PP NOMOR 24 TAHUN 2005 BERBASIS CASH TOWARD ACCRUAL	PP NOMOR 71 TAHUN 2010 BERBASIS FULL ACCRUAL
1	PT. Linggau Bisa	√	
2	PDAM Tirta Bukit Sulap	√	
3	BLUD RS. Siti Aisyah	√	
4	BLUD Badan Pendidikan dan Pelatihan	√	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Lubuklinggau

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dirumuskanlah perumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Lubuklinggau?

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk;

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah?

D. Kegunaan Penelitian

Disamping tujuan penelitian seperti yang diuraikan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat/kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau mengenai implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan teori yang didapat diperkuliahan selama ini, serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- b. Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada Program Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Dalam pengertian yang lain teori adalah sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis yang merupakan cerminan dan kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa atau benda.

Berdasarkan penjelasan diatas teori merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Teori merupakan sekumpulan definisi konsep dan porposisi yang saling berkaitan yang menghadirkan suatu tujuan yang sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan yang khas diantara variabel-variabel. Teori yang digunakan atau dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu teori-teori yang berkenaan dengan teori kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan.

1. Pengertian kebijakan

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*". Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan

pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut para Pakar kebijakan mengandung beragam pengertian, para pakar berusaha mendefinisikan kebijakan melalui berbagai sudut pandang, beberapa pendapat ahli tentang definisi kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy (dalam Suwitri, S. Purnaweni, H, & Kismartini, 2014: 1.5-1.6) adalah sebagai berikut:

- a. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai suatu pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
- b. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

- c. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- d. Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:
 - 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
 - 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
 - 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Banyaknya pengertian atau definisi tentang kebijakan yang dikemukakan para pakar, benang merahnya adalah terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu:

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*Interest public*);
- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acap kali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintah;
- d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan, sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan.

2. Pengertian publik

Publik berasal dari kata *public* yang diartikan beraneka ragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Menurut Irfan Islamy (dalam Suwitri, S. Purnaweni, H, & Kismartini, 2014: 1.7) memberikan contoh keanekaragaman pengertian kata publik dalam rangkaian kata sebagai berikut:

- a. *Public opinion* diterjemahkan dengan pendapat umum. Kata publik mengandung pengertian umum.
- b. *Public Library* diterjemahkan perpustakaan rakyat. Kata publik mengandung pengertian rakyat.
- c. *Public Health* diterjemahkan sebagai kesehatan masyarakat. Kata publik mengandung pengertian sebagai masyarakat.

Dari satu kata publik terkadang makna umum, rakyat dan masyarakat, berikut contoh kata yang lainnya:

- a. *Public Administrasion*, dialihbahasakan menjadi Administrasi Negara.
- b. *Public Policy*, dialihbahasakan menjadi Kebijakan Publik.

Jadi kata publik berarti negara atau publik, namun tersirat satu hal yang penting dalam kata publik yaitu harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat karena

sudah terjadi pergeseran orientasi dari kepentingan birokrasi ke kepentingan publik.

3. Pengertian dan implementasi kebijakan publik

Pemahaman terhadap arti ataupun makna dari kebijakan public telah dicoba untuk didiskusikan dan diperdebatkan oleh para ahli (dalam Prosojo, E. dkk. 2015: 3.3).

Kebijakan publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat, oleh karena itu kebijakan publik dapat dikatakan sebagai ilmu terapan yang berperan sebagai *problem solver*. Dalam konteks ini kebijakan publik dan penentu kebijakan sendiri haruslah berorientasi pada kepentingan publik, harus mempunyai semangat kepublikan dan berpegang pada konsep demokrasi.

Irfan Islamy (dalam Suwitri, S. Purnaweni, H, & Kismartini, 2014: 1.7) telah mengumpulkan beberapa pengertian kebijakan publik seperti pendapat Thomas R. Dye, George C. Edward III dan Ira Sharkansky, James E. Anderson dan David Easton. Apabila diperhatikan dengan seksama terdapat beberapa sudut pandang dari para ilmuwan administrasi publik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

a. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.

Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.”

Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. tidak melakukan suatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki

dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

Senada dengan pandangan Dye adalah George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, yaitu:

Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkap pejabat politik dan atau pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.”

James E. Anderson: “Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintahan.”

- b. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan: “Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.”

David Easton: “Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.”

- c. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan:

James E. Anderson: “Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintahan.”

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky: “Kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.”

Dari ketiga sudut pandang tersebut terdapat pengertian kebijakan publik, tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat diterapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan dalam batas kewenangannya masing-masing.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Suwitri, S. Purnaweni, H, & Kismartini, 2014: 1.9) hal ini disebabkan oleh 3 (tiga) hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu:

- a. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*);
- b. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*);
- c. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang hampa nilai, melainkan sarat nilai. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, akan menjadi desakan bagi pemerintah sebagai wakil-wakil

masyarakat untuk memformulasikan dan mewujudkan dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang akan mengatur pengalokasian nilai-nilai masyarakat tersebut secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Kesemua perumusan dan pengalokasian nilai-nilai masyarakat merupakan pilihan pemerintah untuk mencapai tujuan (Suwitri, S. Purnaweni, H, & Kismartini, 2014: 1.9-1.10)

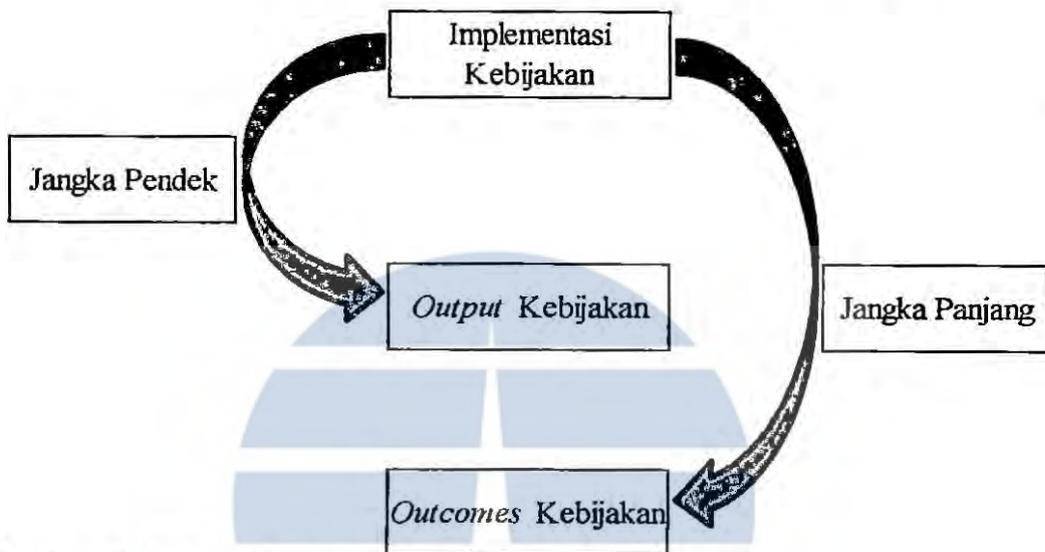
Menurut Suwitri, S. Purnaweni, H, & Kismartini, (2014: 4.7) dalam kebijakan publik, kesalahan dalam merumuskan atau memformulasikan masalah akan berdampak pada kesalahan kebijakan publik yang dibuat atau dilaksanakan.

Menurut Indiahono. D (2009: 143) Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang sebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar dapat diterapkan dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* merupakan keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan dan dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Sedangkan *outcomes* adalah dampak dari kebijakan yang diharapkan dapat timbul setelah

keluarnya *output* kebijakan. *Outcomes* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Gambar 2.1
Dimensi waktu *output* dan *outcomes* kebijakan



Sumber: Indiahono, 2009:143

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya 2 (dua) pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up* (Agustino, L. 2014: 140).

Pendekatan *top down* implementasi kebijakan dilakukan tersentralisir dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat pada level bawahnya. Sedangkan pendekatan *bottom up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan persoalan dan permasalahan yang mereka alami.

Beberapa model pendekatan implementasi kebijakan yang menganut aliran *top down* sebagai berikut;

a. Model Donal Van Meter dan Carl Van Horn

Model proses implementasi kebijakan ini dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn di sebut dengan "*A Model of The Policy Implementation*" (Agustino, 2014: 141). Proses implementasi ini merupakan suatu abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja publik.

Menurut Van Metter dan Van Horn, (dalam Agustino, 2014: 142), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu :

1) Ukuran dan Tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang meralisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Sedangkan sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah Sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian dengan sumberdaya waktu dimana saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dan berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan. karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

3) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksanaan proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan

serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksanaan yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang terlibat.

4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksanaan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementai kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

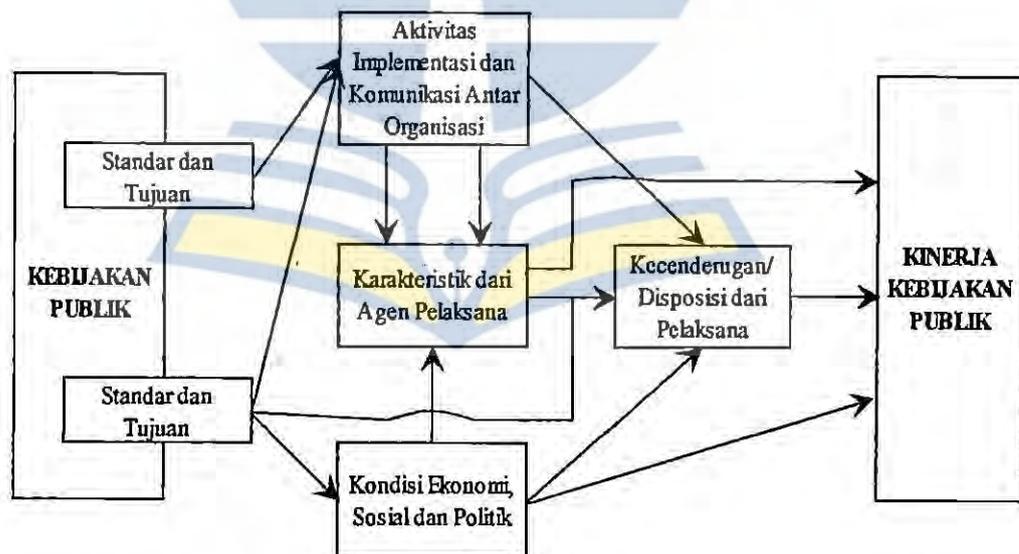
6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van metter dan Van Horn

adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berikut ini adalah gambar yang mengilustrasikan atau menerangkan model pendekatan *The Policy Implementation Process* yang diusung oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn.

Gambar 2.2
Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*
menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn



Sumber: Agustino, L. 2014: 144

b. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model kerangka analisis implementasi ini dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka

disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis* (Agustino, 2014: 144). Peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori besar, yaitu :

1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :

a) Kesukaran-kesukaran Teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya : kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi masalah dan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

b) Keberagaman perilaku yang diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksanaan (administratur atau birokrat) di lapangan.

c) Persentase totalitas penduduk yang tercangkup dalam kelompok sasaran.

semakin kecil dan semakin jelas elompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang

untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

- d) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar / sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil, artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.
- 2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat. Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara :
- a) Kecermatan dan kejelasan dengan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.
- b) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.
- c) Ketetapan alokasi sumberdana. Tersediannya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga- lembaga atau instansi-instansi.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dimana, badan dan lembaga alpa dilaksanakan, maka kordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

- e) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

- f) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang. Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena top down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplementasikan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

- g) Akses formal pihak-pihak luar.

Faktor lain Yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini

maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3) Variabel-variabel diluar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

a) Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam kondidi sosial, ekonomi dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

b) Dukungan publik

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dilapangan.

c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

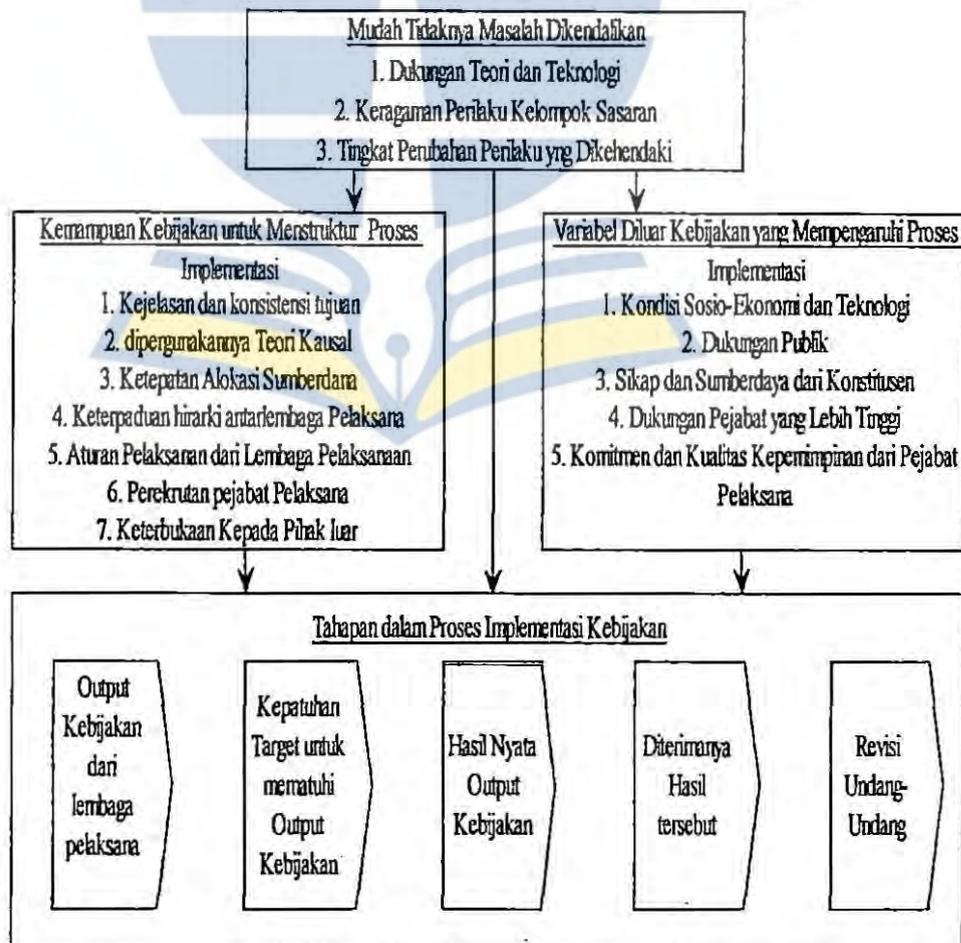
Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang dimiliki warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan

hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

d) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhannya pada badan-badan pelaksanaan melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Gambar 2.3
Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier



Sumber: Agustino, L. 2014: 149

c. Model George C. Edward III

Model ini dinamakan sebagai model *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model ini memiliki empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (dalam Agustino, L, 2014: 149-154).

1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah komunikasi adalah:

- a) Transmisi; Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b) Kejelasan; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.;

c) **Konsistensi;** Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2) **Sumber daya**

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari:

a) **Staf;** sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau pun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompetan dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) **Informasi;** dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu *pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) **Wewenang;** pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi dalam konteks yang lain, ketika kewenangan formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya.

- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan tentang pelaksanaan suatu kebijakan publik. Terdapat hal-hal penting yang perlu dicermati dalam keberhasilan disposisi ini;

- a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan

pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

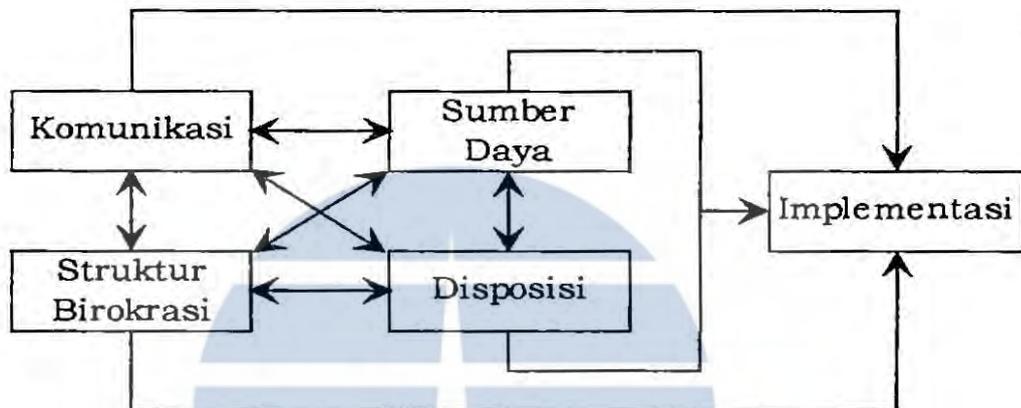
- b) Insentif; salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah yang baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4). Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan menentukan koordinasi yang baik. Apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan tersebut tidak akan berhasil diimplementasikan. Terdapat dua hal yang akan meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu *Standar Operating Prosedurs /SOPs* (suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan), dan fragmentasi (upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas- aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja).

Gambaran tentang hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.4
Model Pendekatan George C. Edward III



Sumber: Agustino, L, 2014: 150

d. Model Merilee S. Grindle

Menurut model Merilee S. Grindle, (dalam Agustino, L. 2014: 154), yang dikenal dengan "*Implementation as A Political and Administrative Process*", dimana menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yakni :

- a) **Impak atau efeknya** pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b) **Tingkat perubahan yang terjadi** serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Grindle, (dalam Agustino, L. 2014: 154) amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* (Isi dari Kebijakan) dan *Context Of Policy* (Kontek dari Implementasi Kebijakan), yaitu :

(1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah :

- (a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- (b) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- (c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai).

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of Policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

(d) *Site of Decision making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

(e) *Program Implementer* (pelaksana program).

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan, dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

(f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mengandung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

(2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

(a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh actor

yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

- (b) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- (c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Sedangkan pendekatan *bottom up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mapu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia didaeranya, sistem sosio-kultur yang ada agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan variabel atau permasalahan yang sama atau hampir sama adalah sebagai berikut:

1. Damayanti. E. (2012) dengan judul penelitian Analisis Implementasi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis *Cash Towards Accrual* Tahun Anggaran 2007-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kota dalam hal penyajian akun-akun seperti kas, piutang, aset tetap, dan kewajiban selama menggunakan CTA. (2) menjelaskan kelemahan penerapan basis CTA. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari suatu gejala yang ada dengan maksud memberikan penjelasan sistimatis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.
2. Kusuma. M.I.Y, Fuad (2013) dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Pengaruh pelatihan staf keuangan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual, (2) Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual, (3) Pengaruh Dukungan Konsultan Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual, (4) Pengaruh Pengalaman Sebelumnya Dalam Menjalankan Basis Kas Menuju Akrual Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual, (5) Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Pimpinan Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual, (6) Pengaruh Ukuran Satuan Kerja Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut.

3. Langelo. F, Saerang. D. P.E., Alexander. S. W. (2015). dengan judul penelitian Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan Pemerintah Kota Bitung berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrua!. Metode yang digunakan adalah studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Acrua!*) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrua!.
4. Sitorus. S, Kalangi. L, Walandouw. S. K. (2015) dengan judul penelitian Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Berdasarkan PP. No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Penelolan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Tujuan dari penelitian ini adalah a) Proses persiapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua! berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015. b)

Kesiapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015. c) Hambatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan tahun 2015. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif interpretif. Hasil penelitian ini: a) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dalam proses persiapan terhadap penerapan SAP berbasis akrual telah menerima sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengenalan mulai dari latar belakang perubahan akuntansi kas menuju akrual pada akuntansi berbasis akrual kemudian perbedaan kas menuju akrual dengan kas berbasis akrual sampai kepada penerapan akuntansi berbasis akrual. b) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dalam kesiapan terhadap penerapan SAP berbasis akrual belum memiliki kesiapan. c) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon memiliki hambatan dalam penerapan SAP berbasis akrual karna penempatan SDM yang kurang tepat berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

5. Rahmawati. N, Made. A, Wirsandono. D. (2016) dengan judul penelitian Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan

laporan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan adalah studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan berbasis akruwal di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang akan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016.

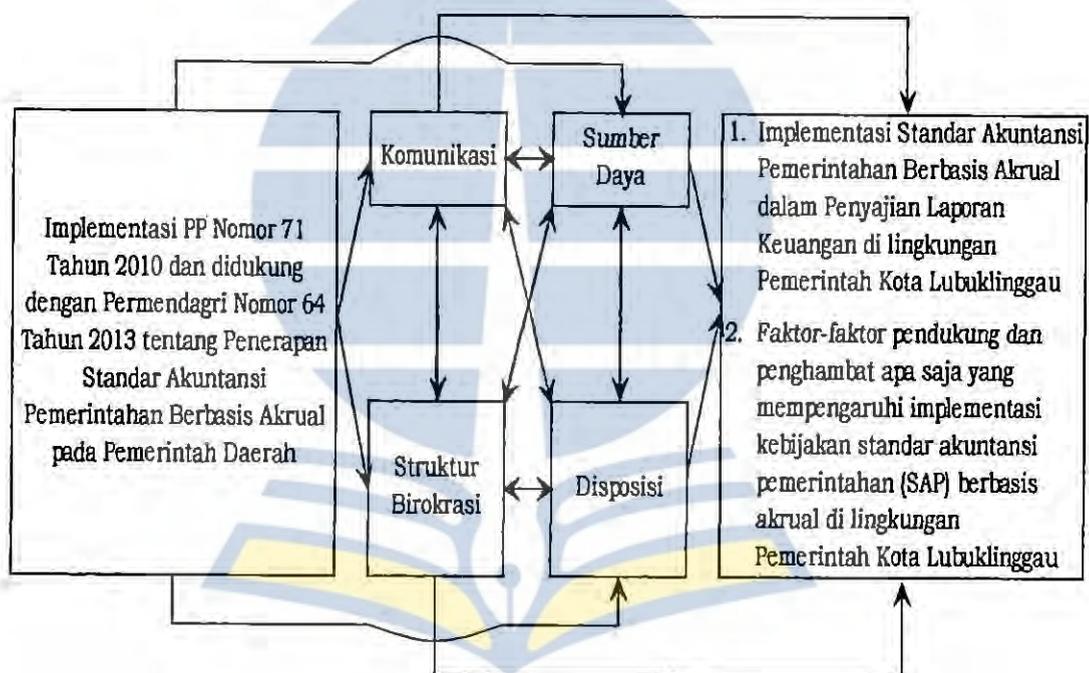
6. Mansyur, M. U. (2016) dengan judul penelitian Implementasi Akuntansi Basis Akruwal pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menemukan makna implementasi akuntansi basis akruwal pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2) Memahami implementasi akuntansi basis akruwal pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mendorong perubahan organisasi. (3) Memahami implementasi akuntansi basis akruwal pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam teori *New institutional*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

C. Kerangka Berpikir/ Kerangka Teoritik

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka peneliti memulainya dengan menegaskan teori yang dijadikan landasan dan akan diuji atau digambarkan dalam penelitian ini (Muhidin. Sambas Ali, 2011).

Berdasarkan model pendekatan implementasi kebijakan yang menganut aliran *top down* yang dipaparkan diatas, maka peneliti mencoba untuk menyusun kerangka pemikiran tentang analisis implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 2.5
Model Pendekatan George C. Edward III
yang dikembangkan untuk penelitian ini



Sumber: Teori George C. Edward III yang dikembangkan untuk penelitian ini.

Berdasarkan teori yang diusung oleh George C. Edward III tersebut diatas maka peneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai analisis implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Selain itu peneliti ingin mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Lubuklinggau.

D. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang menganut aliran *top down* yang diusung oleh George C. Edward III yang memiliki empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (dalam Agustino, L. 2014: 149-154).

Operasionalisasi konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini adalah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran, sebagai berikut:

1. Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 yang didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Lubuklinggau.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akruaI di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Hamdi, M. & Ismaryati, S (2014: 6.27) Desain penelitian adalah bagian dari metode penelitian yang berisikan uraian mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian berisikan uraian mengenai alasan pilihan pendekatan kualitatif dan tujuan yang akan dicapai dengan penggunaan pendekatan tersebut sesuai dengan hal yang akan diteliti (dalam Hamdi, M. & Ismaryati, S. 2014: 6.27)

Tujuan desain penelitian dalam penelitian kualitatif adalah untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan sesuatu hal. Dalam tujuan tersebut, maka penelitian kualitatif akan berciri sebagai penelitian yang bersifat induktif dan idiografis (Hamdi, M. & Ismaryati, S. 2014: 6)

Mengacu pada pendapat Creswell (dalam Hamdi, M. & Ismaryati, S. 2014: 6.5) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti menyatakan rumusan masalah, bukan sasaran penelitian (seperti hasil-hasil akhir yang ingin diperoleh dalam penelitian) ataupun hipotesis-hipotesis (seperti prediksi-prediksi yang melibatkan variabel-variabel dan pengujian-pengujian statistik)

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Prastowo, 2016: 22), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Lexy J. Moeleong (dalam Prastowo, 2016: 23) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Selanjutnya menurut Lexy J. Moeleong (dalam Prastowo, 2016: 27) mengungkapkan bahwa pada dasarnya landasan teoritis penelitian kualitatif itu bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Oleh karena itu pada bagian fenomenologi dijadikan sebagai dasar teoritis utama, sedangkan yang lainnya (interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi) dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatarbelakangi secara teoritis penelitian kualitatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, menurut Nazir (dalam Prastowo, 2016: 186) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Oleh Suharsimi Arikunto (dalam Prastowo, 2016: 186) ditegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif (metode studi kasus dan metode deskriptif berkesinambungan) (Prastowo 2016:184).

Menurut Neong Muhajir (dalam Prastowo 2016: 187) bahwa metode studi kasus (pendekatan genetik) merupakan penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka

waktu yang lama. Studi ini merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. (Basuki dalam Prastowo, 2016: 187).

Adapun ciri khas metode studi kasus ini menurut Surakhman, 1994: 143; Nazir, 1988: 67; Basuki, 2006: 113-114 (dalam Prastowo, 2016; 187) adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan terhadap suatu kasus dilakukan secara intensif dan mendetail sehingga pada umumnya menghasilkan gambaran yang longitudinal.
2. Subjek yang diselidiki terdiri atas satu unit yang dipandang sebagai kasus.
3. Diperlihatkannya kebulatan dan keseluruhan kasus, termasuk (bila diperlukan) kebulatan siklus hidup kasus dan keseluruhan interaksi faktor-faktor dalam kasus ini.
4. Hasil penelitiannya adalah suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga dan sebagainya.
5. Studi kasus lebih menekankan menyelidiki variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang kecil.
6. Studi kasus cenderung menghasilkan kesimpulan dari situasi kekhususan yang dapat atau tidak dapat diterapkan pada situasi yang lebih umum.
7. Studi kasus menghasilkan penelitian yang bersifat khusus, tidak dapat dibuat rampadan (generalisasi). Jika mau membuat generalisasi, harus menggunakan sampel yang lebih besar menurut Basuki (dalam Prastowo, 2016; 188).

Metode deskriptif berkesinambungan ini merupakan kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan terus menerus atas suatu objek penelitian. Pada umumnya dilakukan untuk meneliti masalah-masalah sosial. Untuk dapat

membuat generalisasi suatu situasi atau fenomena secara dinamis, peneliti membutuhkan perhatian yang ekstra-detail terhadap perubahan-perubahan yang dinamis dalam suatu interval tertentu.

Secara khusus ciri khas metode deskriptif menurut Surkhman (Prastowo, 2016; 188) adalah sebagai berikut:

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (karena itu metode ini sering pula disebut metode analitis)

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian implementasi kebijakan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau menggunakan pendekatan teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yaitu:

1. Komunikasi

adapun fenomena yang merupakan indikator yang akan diamati adalah:

- a. Kejelasan informasi tentang kebijakan penyusunan laporan keuangan.
- b. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi tersebut harus jelas.
- c. Perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan sesuai aturan, karena jika perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan dalam tugasnya dengan baik.

2. Sumber daya

adapun fenomena yang merupakan indikator yang akan diamati adalah:

- a. Kecukupan jumlah sumber daya manusia meliputi kuantitas, kualitas SDM, dan anggaran yang dimiliki.
- b. Informasi mengenai data kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang yang diberikan untuk dapat memproses implementasi.
- d. Fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana yang tersedia.

3. Disposisi atau sikap

adapun fenomena yang merupakan indikator yang akan diamati adalah:

- a. Pengangkatan personil pelaksana yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Besaran Insentif yang diterima oleh pelaksana kebijakan implementasi.

4. Struktur Birokrasi

adapun fenomena yang merupakan indikator yang akan diamati adalah:

- a. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Pembagian tugas dan koordinasi diantara beberapa unit kerja.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Menurut Spradley (dalam Sugiyono. 2013: 215) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas 3 (tiga) elemen, yaitu: Tempat (*place*), Pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Tetapi sebenarnya objek penelitian kualitatif, juga bukan semata mata pada situasi sosial yang terdiri dari

tiga elemen seperti yang dinyatakan oleh Neuman diatas saja, namun bisa juga berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang dipilih dan digunakan:

1. *Purposive sampling*

Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa hingga akan memudahkan penelitian.

2. *Snowball sampling*

Teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi banyak. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti dilakukan oleh peneliti itu sendiri sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya (Sugiyono. 2013: 222).

Nasution (dalam Sugiyono, 2013: 223) dalam hal instrumen penelitian kualitatif menyatakan bahwa :

”Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu satunya yang dapat mencapainya.”

Berdasarkan pernyataan pakar atau ahli diatas dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah masalah yang akan dipelajari jelas maka dapat dikembangkan suatu instrumen yang dapat membantu penelitian.

Instrumen bantu dalam penelitian ini adalah telepon genggam, kamera, dan alat tulis kantor.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*in depth interview*)

Menurut Sugiyono (2013: 231) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dengan seseorang untuk dapat data atau informasi mengenai sesuatu hal tertentu atau mengenai orang lain. Seseorang yang akan diwawancarai adalah

berdasarkan pertimbangan ia adalah seorang ahli, dan atau memiliki pemahaman mendalam tentang bidang yang akan diwawancarakan. Kemudian wawancara juga bisa dilakukan kepada seseorang tertentu untuk memperoleh data dan informasi tentang dirinya, baik mengenai sikap dan perilakunya maupun mengenai persepsi dan visinya. Orang yang diwawancarai dengan tujuan yang demikian disebut dengan istilah responden.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 240) Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengumpulan data observasi dan wawancara. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2013: 241) Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan sumber lain.

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Untuk memperoleh data dan pemahaman yang memadai maka penentuan informan ditentukan dengan teknik purposif, artinya peneliti menentukan responden/informan/ sumber data dengan memilih subjek yang mengetahui benar

tentang permasalahan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Informan atau sumber data dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang merupakan entitas pelaporan, baik sebagai pimpinan maupun pelaksana. Mereka adalah:

1. Kepala BPKAD Kota Lubuklinggau,
2. Kepala bidang akuntansi dan pelaporan di BPKAD Kota Lubuklinggau,
3. Kepala Sub. Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah pada Bidang akuntansi dan pelaporan di BPKAD Kota Lubuklinggau,
4. Kepala Sub. Bidang Pembukuan Belanja Daerah pada Bidang akuntansi dan pelaporan di BPKAD Kota Lubuklinggau,
5. Kepala Sub. Bidang Administrasi Pelaporan pada Bidang akuntansi dan pelaporan di BPKAD Kota Lubuklinggau,

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dari Informan kunci (*key informan*) selaku entitas pelaporan akan dilakukan triangulasi (*cross check*) kepada 7 (tujuh) orang Informan triangulasi. Informan triangulasi tersebut merupakan entitas akuntansi yang diambil mewakili dari SKPD yang memiliki anggaran besar, sedang dan kecil pada tahun anggaran 2016 dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Mereka adalah:

1. Kasubag. Keuangan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau,
2. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau,
3. Kasubag. Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau,
4. Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau,

5. Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau,
6. Kasubag. Keuangan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau,
7. Bendaharan Pengeluaran Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau.

E. Metode Analisis Data

Analisis data sebagaimana yang dikemukakan Neuman (dalam Hamdi, M. & Ismaryati, S. 2014: 8.3) selalu merupakan *“a search for pattern in data-recurrent behavior, objects, or a body of knowledge”*. Pernyataan Neuman tersebut menjelaskan bahwa analisis data adalah suatu pencarian pola dalam data dan pola itu berarti suatu kecenderungan pengulangan kejadian dari perilaku, objek, atau kumpulan pengetahuan.

Lebih lanjut Neuman (dalam Hamdi, M. & Ismaryati, S. 2014: 8.3) menyatakan bahwa berbagai cara itu mencakup pengujian, penyortiran, pengategorisasian, pengevaluasian, perbandingan, penyesuaian, serta pengontemplasian data yang telah dikode dan juga pereviuan data mentah dan data rekaman.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Mile dan Huberman (dalam Sugiyono. 2013; 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambaran umum mengenai penelitian ini berisi tentang fokus, lokus dan waktu penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi kebijakan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akruwal di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Sementara lokus penelitiannya adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. Waktu penelitian yaitu bulan Meret tahun 2017.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah terutama Pasal 10 ayat (2) menyatakan penerapan SAP berbasis akruwal pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Maka laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk periode tahun anggaran 2015 sampai dengan penelitian ini sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akruwal.

Kota Lubuklinggau dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuklinggau. Wilayah administrasi Kota Lubuklinggau meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuklinggau Barat, Lubuklinggau Timur, Lubuklinggau Utara dan Lubuklinggau Selatan.

Empat kecamatan tersebut membawahi 40 kelurahan. Pada tahun 2002, dilakukan pemekaran kelurahan, sehingga jumlah kelurahan menjadi 49 kelurahan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 216.270 jiwa, tahun 2015 sebanyak 219.471 jiwa. Adapun jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 222.900 jiwa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2005 telah ditetapkan Perda Lubuklinggau No.180 dan No. 181 Tahun 2004 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan. Jumlah kecamatan dari 4 menjadi 8 kecamatan, yaitu:

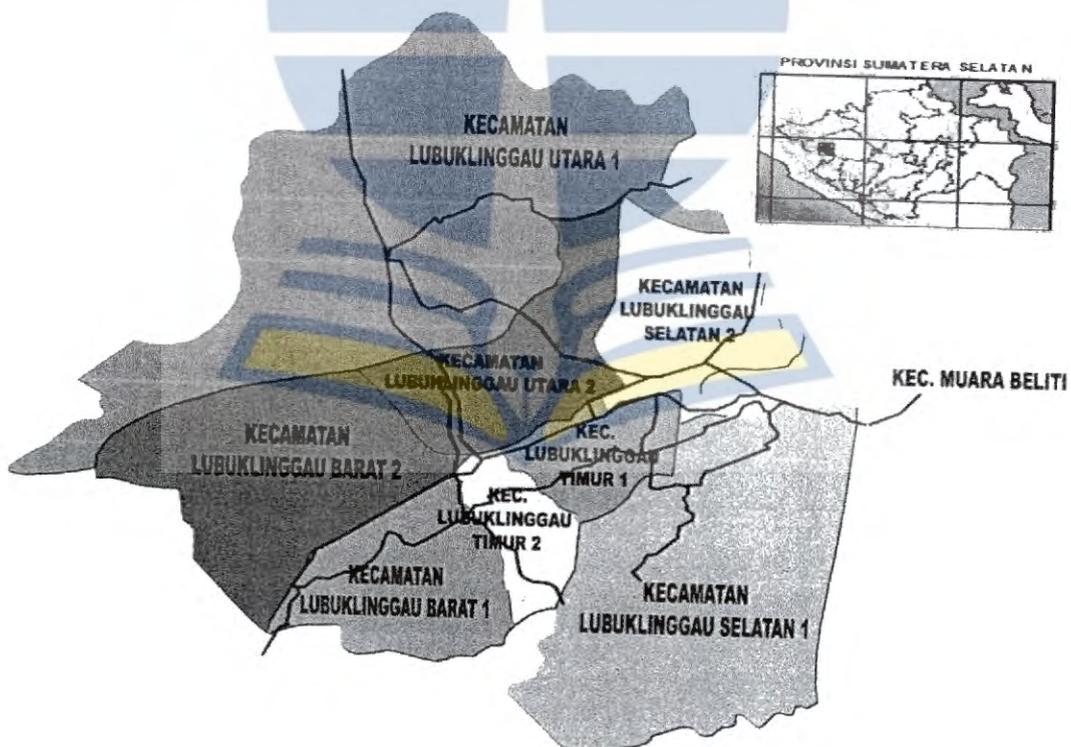
1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I,
2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II,
3. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I,
4. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II,
5. Kecamatan Lubuklinggau Timur I,
6. Kecamatan Lubuklinggau Timur II,
7. Kecamatan Lubuklinggau Utara I,
8. Kecamatan Lubuklinggau Utara II.

Adapun jumlah kelurahan dari 49 menjadi 72 kelurahan, dan memiliki luas wilayah 401,50 Km atau 40.150 Ha. Kota Lubuklinggau adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi sumatera selatan yang terletak pada posisi antara 102° 40' 0" - 103° 0' 0" bujur timur dan 3° 4' 10" - 3° 22' 30" lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi

Bengkulu yang secara administratif mempunyai batas-batas sebagai berikut (Bagian Organisasi Setda Kota Lubuklinggau, 2014):

- Bagian Utara : Berbatasan dengan Kecamatan. BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bagian Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kec. Muara Beliti dan Provinsi Bengkulu.
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Gambar 4. 1
Peta Wilayah Kota Lubuklinggau



Penduduk Kota Lubuklinggau termasuk multi etnis dengan mayoritas Suku Saling, Suku Musi, Suku Rawas sebagai Suku asli Sumatera Selatan serta Suku Jawa, Suku Minang, Suku Sunda, Suku Batak dan China. Agama yang dianut oleh

sebagian besar penduduk adalah agama Islam, sedangkan agama lain seperti Kristen dan Katolik banyak dianut oleh Suku Jawa, Batak dan China.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Lubuklinggau terdapat enam macam bahasa yaitu Bahasa Musi dan Adat Saling, Musi, Rawas, Bahasa dan Adat Jawa, Bahasa dan Adat campuran. Hubungan kekerabatan yang ada cukup eratterbukti belum pernah terjadi konflik yang berlatar belakang suku dan adat.

B. Hasil

Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan oleh peneliti guna mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akruwal di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yaitu melalui wawancara secara mendalam terhadap Informan.

Pada saat wawancara mendalam tersebut peneliti fokuskan pada kerangka teori yang telah peneliti ambil yaitu berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang memiliki 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Indikator Komunikasi

Dalam menganalisis indikator komunikasi dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan jawaban Informan kunci menjadi satu kelompok agar mudah menarik kesimpulan. Berikut adalah hasil petikan penjelasan dari Informan kunci:

Informan kunci 1 menjelaskan bahwa: "Pemerintah Kota Lubuklinggau selama ini sudah dua kali menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis yaitu pada tahun 2015 dan 2016, dengan peserta yang diundang adalah Pengguna anggaran, Kasubag. Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran semua SKPD, BUMD dan BLUD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang merupakan entitas akuntansi". "Narasumber yang kami ajak kerja sama untuk memberikan materi adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

Selanjutnya Informan kunci 2 menjelaskan bahwa: " Ya, kami sudah dua kali menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diikuti oleh seluruh entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau". "... Ya disini, di Kota Lubuklinggau, narasumber dalam sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yang kami undang untuk memberikan materi mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual".

Kemudian Informan kunci 3 menjelaskan bahwa: "Pemerintah Kota Lubuklinggau pernah menyelenggarakan sosialisasi /bimbingan teknis sebanyak dua kali yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, yang diikuti seluruh entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Selain dari itu kalau saya pernah mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis laporan keuangan berbasis akrual, beberapa kali di luar Kota Lubuklinggau". "Dua kali disini di Lubuklinggau dan yang lainnya di Palembang dan Jakarta yang diselenggarakan BPKP dan Kementerian Keuangan, itu pun atas undangan instansi terkait".

Senada dengan Informan Kunci 3, Informan Kunci 4 juga menjelaskan bahwa: "Ya, Pemerintah Kota Lubuklinggau pernah menyelenggarakan sosialisasi/ bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Pak Rudi. Saya sendiri pernah mengikutinya sebanyak empat kali. Dua kali di Lubuklinggau, satu kali di Palembang dan satu kali lagi di Jakarta". "Dua kali disini di Lubuklinggau dengan narasumber BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, yang di Palembang diadakan oleh Provinsi Sumatera Selatan dan di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan".

Sedangkan Informan kunci 5 menjelaskan penjelasan yang hampir senada dengan Informan kunci yang lain, bahwa: Kami pernah menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual Pak, saya mengikutinya sebanyak dua kali". "Dua kali disini di Lubuklinggau dengan narasumber BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

Dari hasil wawancara mendalam, semua informan kunci menyatakan bahwa secara keseluruhan baik entitas akuntansi (seluruh SKPD, BUMD dan BLUD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau) maupun entitas pelaporan (dalam hal ini yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau) sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Namun, dari semua informan kunci, hanya informan kunci 3 dan informan kunci 4 saja yang pernah mendapatkan sosialisasi atau bimbingan teknis yang narasumbernya selain dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yaitu narasumber dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Untuk memvalidasi data yang disampaikan oleh Informan kunci maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Informan triangulasi guna mendapatkan validitas data yang memadai. Informan triangulasi ini berasal dari entitas akuntansi yaitu Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau, dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Berikut adalah hasil petikan penjelasan dari Informan triangulasi:

Informan triangulasi 1 menjelaskan bahwa: "Seingat saya dua kali yaitu pada tahun 2015 dan 2016 di Hotel Smart Kota Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau. Tetapi kalau saya pernah diundang oleh Kementerian Keuangan untuk mengikuti, Kursus Keuangan Daerah Khusus Akuntansi/Penatausahaan (KKDK) berbasis akrual di STAN Tangerang Selatan pada Tahun 2014". "Kalau menurut saya, sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD belum memberikan pemahaman yang maksimal karena sosialisasi/bimbingan teknis tersebut terlalu singkat untuk jumlah peserta yang begitu banyak. Ya... intensitasnya harus ditambah, minimal dua kali dalam setahun". "Kalau yang diselenggarakan oleh

BPKAD Kota Lubuklinggau narasumbernya dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, sedangkan Kursus Keuangan Daerah Khusus Akuntansi/Penatausahaan (KKDK) yang saya ikuti narasumber yang memberikan materi yaitu dari Kementerian Keuangan dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)".

Informan triangulasi 2 menjelaskan bahwa: "Kalau tidak salah dua kali yaitu pada tahun 2015 dan 2016 di Hotel Smart Kota Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau". "Sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD belum cukup kerana diselenggarakan hanya tiga hari, sedangkan pesertanya seluruh entitas akuntansi yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, menurut saya sosialisasi/bimbingan teknis sejenis harus diperbanyak intensitasnya, minimal dua kali dalam setahun". "Narasumber yang memberikan materi yaitu dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

Informan triangulasi 3 menjelaskan bahwa: "Tahun 2015 satu kali dan 2016 satu kali, berarti dua kali Pak Rudi". "Belum, sosialisasi/bimbingan teknis tersebut belum memberikan pemahaman yang maksimal. Kalau menurut saya perlu ditambah intensitas sosialisasi/bimbingan teknisnya. Ya... kira-kira minimal dua kali dalam satu tahun". "Narasumber yang memberikan materi pada sosialisasi/bimbingan teknis dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

Informan triangulasi 4 menjelaskan bahwa: "Tidak pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual Pak Rudi, karena pada tahun 2015 saya sedang cuti dan berada diluar Kota Lubuklinggau, sedangkan pada tahun 2016 saya sakit dan dirawat di rumah sakit", "Ya ... saya tidak bisa menjawabnya karena saya belum pernah mengikuti, tapi saran saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual perlu diperbanyak intensitasnya agar dapat memberikan pemahaman yang lebih bagi teman-teman di entitas akuntansi".

Informan triangulasi 5 menjelaskan bahwa: "Pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis Dua kali, tahun 2015 dan 2016". "Menurut saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD masih kurang memberikan pemahaman karena dilakukan atau diselenggarakan hanya sekali dalam setahun. Setidaknya sosialisasi/bimbingan teknis tersebut diselenggarakan minimal dua kali dalam satu tahun anggaran", "Setahu saya, yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan"

Informan triangulasi 6 menjelaskan bahwa: "Saya mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sudah kira-kira empat kali. Dua kali di Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau tahun 2015 dan 2016, dan dua kali lagi saya mengikutinya di Jakarta pada tahun 2015 dan 2016 juga". "Menurut pendapat saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD belum bisa memberikan pemahaman kepada kawan-kawan pada entitas akuntansi karena diselenggarakan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran. Hendaknya sosialisasi/bimbingan teknis sejenis diselenggarakan sesering mungkin atau minimal per semester". "Kalau sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau narasumbernya dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. Namun sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang saya ikuti di Jakarta narasumbernya berasal dari Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan diklat terkait SAP berbasis akrual".

Informan triangulasi 7 menjelaskan bahwa: "Saya mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis dua kali di Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 dan 2016". "Kalau menurut saya, sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD masih perlu diperbanyak intensitasnya, agar bisa memberikan pemahaman yang lebih tentang SAP berbasis akrual". "Sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau narasumbernya dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

Hasil konfirmasi dengan Informan triangulasi pada penelitian ini, semua Informan triangulasi menyatakan bahwa mereka sudah pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Kecuali Informan triangulasi 4 karena pada saat sosialisasi/bimbingan teknis diselenggarakan sedang cuti dan ditahun berikutnya sakit. Sedangkan Informan triangulasi 1 dan Informan triangulasi 6 bahkan pernah mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berbasis akrual selain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Semua Informan triangulasi menyatakan bahwa mereka belum dapat memahami secara maksimal tentang SAP berbasis akrual sehingga mereka menginginkan diselenggarakannya sosialisasi/bimbingan teknis sejenis dengan intensitas yang lebih banyak lagi, minimal dua kali dalam satu tahun anggaran.

2. Indikator Sumber Daya

Sumber daya disini adalah yang berkaitan dengan sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana. Berikut adalah hasil petikan wawancara dilakukan peneliti dengan Informan kunci:

Informan kunci 1 menjelaskan bahwa: "Kami menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau ini secara tim, melalui keputusan Walikota Lubuklinggau. Dan dibantu oleh tim asistensi dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. Tim asistensi ini juga membantu entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya". "Menurut pengamatan saya, tim yang menyusun laporan keuangan ini memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup baik mengenai standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Tetapi kalau personil yang ada di entitas akuntansi, kami tidak begitu mengetahuinya, tetapi dari data yang masuk yang melaporkan laporan keuangan pada tahun 2016, tidak ada entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan menggunakan basis akrual". "Saya rasa kalau masalah anggaran relatif ya, sepanjang ini kami dapat memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal juga". "Menurut saya sarana dan prasarana tersedia dan memadai baik di BPKAD sebagai entitas pelaporan maupun SKPD, BUMD, dan BLUD sebagai entitas akuntansi".

Informan kunci 2 menjelaskan bahwa: "Kalau dari jumlah atau kuantitas personil kami merasa cukup. Baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi, Apalagi kami dibantu oleh tim asistensi BPKP Perwakilan Sumatera Selatan". "SAP berbasis akrual inikan masih baru, pemahaman yang dimiliki personil terhadap basis akrual tidak merata baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi oleh karena itu masih harus ditingkatkan dengan cara mengikuti sosialisasi dan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan baik oleh

pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga yang berkompeten lainnya". "Berkaitan dengan insentif... cukup atau tidaknya tergantung kepada kita, maksudnya kalau diberikan anggaran lebih kami sangat berterima kasih, tetapi kalau seperti sekarang ini kami pun tetap bisa melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau secara maksimal". "Menurut saya fasilitas pendukung berupa sarana maupun prasarana sudah cukup memadai baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi".

Informan kunci 3 menjelaskan bahwa: "kuantitasnya personil... Kalau menurut saya pribadi cukup, apalagi kita dibantu oleh tim asistensi dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan" ... Nah ini, personil yang memahami SAP berbasis akrual masih sedikit, baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi". "Anggaran yang disediakan ... Bisa dikatakan cukup, dengan kondisi keuangan Kota Lubuklinggau saat ini". "Ya, kalau sarana dan prasarana tersedia secara memadai".

Informan kunci 4 menjelaskan bahwa: "Menurut pengamatan saya kuantitas personil sudah cukup, baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi". "Pemahaman tentang SAP berbasis akrual masih kurang dan perlu ditingkatkan". "Anggarannya saya rasa tidak ada masalah" "Sarana dan prasarana tersedia secara memadai. Baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi".

Informan kunci 5 menjelaskan bahwa: "berkaitan jumlah personil... Ya ... sudah cukup Pak, kalau jumlah menurut saya sudah cukup". "Kalau dari jumlah sudah cukup, pemahaman tentang SAP berbasis akrual masih sedikit dan dimasa yang akan datang perlu ditingkatkan pemahaman tentang SAP berbasis akrualnya melalui kursus, bimtek atau sejenisnya yang lain". "Kalau anggaran cukup". "Sarana dan prasarana baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi sudah memadai dan dapat dikatakan lengkap".

Dilihat dari hasil wawancara mendalam diatas menurut semua Informan kunci terungkap bahwa kuantitas personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan sudah cukup. Apalagi ditambah personil dari tim asistensi BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. Sedangkan berkenaan dengan kualitas personil atau pengetahuan personil terhadap SAP berbasis akrual masih sedikit/kurang dan perlu ditingkatkan, kecuali Informan kunci 1 yang menyatakan bahwa tim

penyusun laporan keuangan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup baik mengenai standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.

Terkait anggaran yang disediakan semua Informan kunci menyatakan cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Sedangkan fasilitas pendukung baik sarana dan prasarana dinilai memadai oleh semua Informan kunci.

Kemudian untuk memvalidasi data yang disampaikan oleh Informan kunci maka peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan Informan triangulasi guna mendapatkan validitas data yang memadai. Berikut adalah hasil petikan penjelasan dari Informan triangulasi:

Informan triangulasi 1 menjelaskan bahwa: "Mengenai penyusunan laporan keuangan, ini merupakan tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan, jadi kami semua terlibat. Jumlah kami seluruhnya ada 6 orang". " Menurut saya, SAP berbasis akrual inikan masih baru jadi perlu di pelajari lebih lanjut sehingga mendapatkan pemahaman yang memadai". " Ya cukuplah, karena mau tak mau ini merupakan tupoksi kita, jadi harus diselesaikan". "Kalau sarana dan prasarana tersedia dan memadai sehingga dapat menunjang pekerjaan kami".

Informan triangulasi 2 menjelaskan bahwa: "Kami semua terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan jumlah kami sebanyak enam orang". "Saya belum begitu paham dengan SAP berbasis akrual, mungkin saya dan kami semua perlu mengikuti sejenis bimtek untuk menambah pemahaman kami tentang SAP berbasis akrual". "Cukup, walaupun masih perlu ditingkatkan tahun-tahun yang akan datang". "Ya, kalau sarana dan prasarana tersedia secara memadai".

Informan triangulasi 3 menjelaskan bahwa: "Jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual... Tiga orang, mereka adalah staf pada Sub Bagian Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan. Termasuk saya". " Walaupun penyusunan laporan keuangan adalah tupoksi saya selaku kasubag. keuangan namun saya masih butuh belajar lagi untuk memahami SAP berbasis akrual". "Mengenai anggaran ... Ya, cukup. Setidaknya ini menurut saya". "Kalau sarana dan prasarana cukup. Bahkan lebih dari cukup".

Informan triangulasi 4 menjelaskan bahwa: "Jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ... Tiga orang, dan saya mengelola data tentang pendapatan dari Dinas Perikanan dan Peternakan". "Masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual". "saya, tidak begitu paham tentang anggarannya, tapi setidaknya penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar". "Mengenai sarana dan prasarana ... Ya, sangat memadai".

Informan triangulasi 5 menjelaskan bahwa: "Jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ... Tiga orang, dan saya sebagai Bendahara Pengeluaran dari Dinas Perikanan dan Peternakan". "Belum begitu paham, masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual". "Saya rasa cukup karena penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar". "Mengenai sarana dan prasarana ... Cukup memadai".

Informan triangulasi 6 menjelaskan bahwa: "Jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ... Tiga orang, dan itu termasuk saya sebagai Kasubag. Keuangan". "Walaupun saya sudah sering mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tapi saya belum begitu paham, masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual. Ini mungkin karena saya bukan sarjana akuntansi, tapi saya merupakan sarjana komputer yang secara kebetulan ditugaskan sebagai Kasubag. Keuangan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I". "Berkaitan dengan anggaran... Cukup, karena penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang seharusnya.

Informan triangulasi 7 menjelaskan bahwa: "Ya ... Cuma kami ini, tiga orang, dan saya sebagai Bendahara Pengeluaran". "Saya belum begitu paham, masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual". "Saya kira cukup". "Sarana dan prasarana tersedia dan secara memadai".

Dilihat dari hasil wawancara mendalam diatas menurut semua Informan triangulasi terungkap bahwa kuantitas atau personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan sudah cukup. Sedangkan berkenaan dengan kualitas personil atau pengetahuan personil terhadap SAP berbasis akrual masih sedikit/kurang dan perlu ditingkatkan. Terkait anggaran yang disediakan semua informan menyatakan cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan

berbasis aktual. Sedangkan fasilitas pendukung baik sarana dan prasarana dinilai memadai oleh semua Informan triangulasi.

3. Indikator Disposisi atau Sikap

Indikator disposisi atau sikap pada penelitian ini adalah mengenai pemberian motivasi kepada personil pelaksana dan insentif yang diberikan. Berikut adalah hasil petikan penjelasan dari Informan kunci:

Informan kunci 1 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Saya melakukannya dengan pendekatan kekeluargaan dan saya berusaha memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang timbul didalam tim penyusunan laporan keuangan ini". "Ada, tetapi insentif yang diberikan berupa honorarium bagi tim penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan, tetapi untuk entitas akuntansi insentif tersebut belum bisa diberikan. Hal ini karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuklinggau".

Informan kunci 2 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi ... Kami selalu berdiskusi, berusaha memecahkan masalah-masalah yang timbul. Demikianlah kami semua saling menguatkan dan memotivasi satu dengan yang lain dan kami selalu memberikan kesempatan bagi kawan-kawan kami yang berada di entitas akuntansi untuk selalu berkoordinasi". "berkenaan dengan insentif.. Dalam kondisi keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau seperti sekarang ini, yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan maka kami tetap merasa bersyukur atas insentif yang kami terima berupa honorarium, tetapi kami masih prihatin dengan kawan-kawan kami yang berada di entitas akuntansi karena mereka belum bisa diberikan insentif sebagai tambahan atas beban kerja penyusunan laporan keuangan".

Informan kunci 3 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Kami bekarja bahu-membahu dan saling pengertian sehingga tercipta tim yang solid yang memiliki motivasi yang tinggi". "Insentif yang diberikan berupa honorarium untuk tim entitas pelaporan, namun untuk entitas akuntansi belum bisa direalisasikan. Mungkin karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Lubuklinggau".

Informan kunci 4 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi ... Selalu saling menghargai dan kompak baik atasan maupun bawahan". "berkenaan dengan insentif.. Kami menerima honorarium untuk penyusunan laporan

keuangan, tapi pada tingkatan entitas akuntansi belum ada insentif atau honorarium yang diberikan".

Informan kunci 5 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi ... Selalu saling menghargai satu dengan yang lain". "berkenaan dengan insentif... Kami bukan mendapatkan insentif, tapi honorarium tim penyusunan laporan keuangan. Tetapi untuk teman-teman di tingkat entitas akuntansi belum bisa mendapatkan insentif atau honorarium atas penyusunan laporan keuangan dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Lubuklinggau".

Dilihat dari hasil wawancara mendalam diatas bahwa memotivasi personil pelaksana agar dapat memiliki dedikasi yang tinggi telah dilakukan oleh semua Informan kunci baik dengan cara kekeluargaan, diskusi, saling pengertian dan saling menghargai. Semua Informan kunci menyatakan bahwa mereka dan personil pelaksana menerima berupa honorarium bagi tim penyusunan laporan keuangan. Tetapi untuk entitas akuntansi insentif tersebut belum bisa diberikan. Hal ini karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Kemudian untuk memvalidasi data yang disampaikan oleh Informan kunci maka peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan Informan triangulasi guna mendapatkan validitas data yang memadai. Berikut adalah hasil petikan penjelasan dari Informan triangulasi:

Informan triangulasi 1 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi ...Saya melakukan pendekatan pertemanan, tidak ada atasan dan bawahan tetapi tetap saling menghargai". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada, tetapi kami mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD Kota Lubuklinggau".

Informan triangulasi 2 menjelaskan bahwa: "Cara kami memotivasi adalah sama-sama saling menghargai dan saling percaya dalam menyelesaikan tugas-tugas kami". "Tidak ada, kami mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dicairkan dua bulan sekali".

Informan triangulasi 3 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Cara kami memotivasi adalah sama-sama saling menghargai satu dengan yang lainnya". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada, tapi semua pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sudah mendapatkan TPP yang dicairkan per dua bulan".

Informan triangulasi 4 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... sama-sama saling menghargai dan saling bekerja sama". "berkenaan dengan insentif ... Tidak ada".

Informan triangulasi 5 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Dengan cara bekerja sama, saling pengertian dan saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada".

Informan triangulasi 6 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Ya... bekerja sama, saling menghormati, saling pengertian dan saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada".

Informan triangulasi 7 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Bekerja sama, saling menghormati, saling pengertian dan saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya, seperti yang diungkapkan Pak Kasubag. Keuangan tadi". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada".

Dilihat dari hasil wawancara mendalam dengan Informan triangulasi diatas diketahui bahwa memotivasi personil pelaksana agar dapat memiliki dedikasi yang tinggi telah dilakukan oleh semua Informan triangulasi baik dengan cara kekeluargaan, diskusi, saling pengertian dan saling menghargai dengan atasan maupun bawahan. Semua Informan triangulasi menyatakan bahwa mereka dan personil pelaksana tidak menerima insentif ataupun honorarium. Hal ini karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuklinggau.

4. Indikator Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi pada penelitian ini adalah mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan apakah pembagian tugas dan koordinasi berjalan

sesuai dengan apa yang diinginkan. Berikut adalah hasil petikan penjelasan dari Informan kunci:

Informan kunci 1 menjelaskan bahwa: "Kalau SOP mengenai pelaksanaan penyusunan laporan keuangan secara khusus tidak ada, tetapi kami memiliki kebijakan akuntansi yang diatur melalui Peraturan Walikota Lubuklinggau". "Sepanjang ini ya, pembegian tugas dan koordinasi berjalan lancar tidak ada hambatan yang berarti yang membuat tugas-tugas terkendala".

Informan kunci 2 menjelaskan bahwa: "Dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan kami belum memiliki SOP secara resmi tetapi memiliki peraturan Walikota Lubuklinggau yang mengatur tentang kebijakan akuntansi". "Sejauh ini bisa dikatakan pembagian tugas dan koordinasi berjalan dengan lancar tidak ada hal-hal yang signifikan terjadi sehingga mengganggu pekerjaan kami".

Informan kunci 3 menjelaskan bahwa: "Secara khusus SOP belum kami miliki, tapi kami mengacu pada peraturan yang ada yang berlaku". "Ya pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan semestinya".

Informan kunci 4 menjelaskan bahwa: "SOP untuk tahapan proses penyusunan laporan keuangan belum kami miliki". "Ya ... pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan semestinya".

Informan kunci 5 menjelaskan bahwa: "Belum, kami belum memiliki SOP dimaksud". "Pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan lancar".

Menurut semua Informan kunci bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara general atau umum dalam lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, tetapi seperti yang dikatakan Informan kunci 1 bahwa mereka memiliki kebijakan akuntansi yang diatur melalui Peraturan Walikota Lubuklinggau sebagai pedoman peraturan yang digunakan untuk melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Namun Pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan lancar.

Kemudian untuk memvalidasi data yang disampaikan oleh Informan kunci maka peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan Informan triangulasi guna mendapatkan validitas data yang memadai. Berikut adalah hasil petikan penjelasan dari Informan triangulasi:

Informan triangulasi 1 menjelaskan bahwa: "mengenai SOP ... Tidak, Kami hanya mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah, saya lupa nomor Peraturan Walikota nya". "Ya, pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan lancar".

Informan triangulasi 2 menjelaskan bahwa: "Kami tidak memiliki SOP berkaitan dengan penyelesaian penyusunan laporan keuangan". "Ya, pembagian tugas dan koordinasi tidak ada masalah tetap berjalan sebagaimana mestinya".

Informan triangulasi 3 menjelaskan bahwa: "Kami tidak memiliki SOP tentang penyusunan laporan keuangan". "Saya rasa ya, karena tidak ada kendala yang berarti mengenai pembagian tugas dan koordinasi, semuanya dapat kami atasi".

Informan triangulasi 4 menjelaskan bahwa: "Saya belum pernah melihat atau membaca adanya SOP dalam menyusun laporan keuangan". "Saya rasa ya. Pembagian tugas dan koordinasi tidak ada masalah".

Informan triangulasi 5 menjelaskan bahwa: "Kami belum memiliki SOP terkait menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual". "Iya, sudah berjalan dengan baik karena pembagian tugas dan koordinasi tidak ada masalah. Ini yang saya rasakan".

Informan triangulasi 6 menjelaskan bahwa: "SOP kami belum pernah membaca maupun memilikinya". "Iya, pembagian tugas dan koordinasi sejauh ini tidak ada masalah yang berarti, semuanya dapat diatasi".

Informan triangulasi 7 menjelaskan bahwa: "Belum, kami belum pernah membaca maupun memiliki SOP". "Iya, pembagian tugas dan koordinasi sejauh ini berjalan dengan lancar".

C. Pembahasan

Hasil penelitian ini secara umum sudah dapat menjawab Implementasi kebijakan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Lubuklinggau. Kemudian faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

1. Indikator Komunikasi

Dalam perspektif ilmu komunikasi, proses komunikasi terdiri dari tiga bagian pokok. Ketiga bagian tersebut adalah komunikator (pihak yang bertindak sebagai pemberi informasi dan penerima *feedback*); pesan (*message*) atau informasi yang disampaikan; dan komunikan (pihak yang menerima informasi serta memberikan *feedback* kepada komunikator).

Ketidakjelasan informasi tentu saja membawa akibat bagi hasil pelaksanaan kebijakan. Selain tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan informasi juga bisa mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi (*unanticipated change*). Jadi, alih-alih melakukan perubahan terkendali, kebijakan publik justru menimbulkan perubahan yang tidak terkendali (dan tidak diinginkan) karena adanya ketidakjelasan informasi.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana kebijakan mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dengan demikian, setidaknya, sosialisasi dan atau bimbingan teknis mengenai implementasi kebijakan SAP berbasis akrual yang merupakan kebijakan publik akan memicu dan mengarahkan peran serta pelaksana penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau kearah pemahaman yang lebih baik.

Dalam indikator komunikasi ini yang ingin dilihat adalah proses penyampaian informasi dari praktisi-praktisi yang memahami tentang standard akuntansi pemerintahan, baik yang berbasis Kas (*Cash basic*), basis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual/CTA*), maupun Basis Akrual (*Full accrual*) kepada para

pelaksana implementasi. Praktisi-praktisi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan memberi gambaran perbedaan-perbedaan antara berbasis Kas (*Cash basic*), basis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual/CTA*), maupun Basis Akrual (*Full accrual*). Sehingga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SAP berbasis akrual minimal pelaksana implementasi mempunyai gambaran yang lebih jelas karena sudah mendapatkan informasi dari narasumber yang kompeten dan kredibel.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan kunci yang di *cross check* dengan informasi dari Informan triangulasi. Pertanyaan yang diajukan kepada Informan kunci dan jawaban yang didapat adalah seperti yang tampak berikut ini:

- a. Berapa kali atau Apakah bapak pernah mengikuti dan atau menyelenggarakan sosialisasi/ bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
- b. Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?

Informan kunci 1 menjelaskan bahwa: "Pemerintah Kota Lubuklinggau selama ini sudah dua kali menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis yaitu pada tahun 2015 dan 2016, dengan peserta yang diundang adalah Pengguna anggaran, Kasubag. Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran semua SKPD, BUMD dan BLUD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang merupakan entitas akuntansi". "Narasumber yang kami ajak kerja sama untuk memberikan materi adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

Selanjutnya Informan kunci 2 menjelaskan bahwa: " Ya, kami sudah dua kali menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diikuti oleh seluruh entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau". "... Ya disini, di Kota Lubuklinggau,

narasumber dalam sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yang kami undang untuk memberikan materi mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual”.

Kemudian Informan kunci 3 menjelaskan bahwa: ” Pemerintah Kota Lubuklinggau pernah menyelenggarakan sosialisasi /bimbingan teknis sebanyak dua kali yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, yang diikuti seluruh entitas akuntansi yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Selain dari itu kalau saya pernah mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis laporan keuangan berbasis akrual, beberapa kali di luar Kota Lubuklinggau”. “Dua kali disini di Lubuklinggau dan yang lainnya di Palembang dan Jakarta yang diselenggarakan BPKP dan Kementerian Keuangan, itu pun atas undangan instansi terkait”.

Senada dengan Informan Kunci 3, Informan Kunci 4 juga menjelaskan bahwa: ”Ya, Pemerintah Kota Lubuklinggau pernah menyelenggarakan sosialisasi/ bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Pak Rudi. Saya sendiri pernah mengikutinya sebanyak empat kali. Dua kali di Lubuklinggau, satu kali di Palembang dan satu kali lagi di Jakarta”. ”Dua kali disini di Lubuklinggau dengan narasumber BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, yang di Palembang diadakan oleh Provinsi Sumatera Selatan dan di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan”.

Sedangkan Informan kunci 5 menjelaskan penjelasan yang hampir senada dengan Informan kunci yang lain, bahwa: Kami pernah menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual Pak, saya mengikutinya sebanyak dua kali”. ”Dua kali disini di Lubuklinggau dengan narasumber BPKP Perwakilan Sumatera Selatan”.

Sedangkan pertanyaan yang diajukan kepada Informan triangulasi dan jawaban yang didapat adalah seperti yang tampak berikut ini:

- a. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Berapa kali anda pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
- b. Apakah sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD sudah cukup memberikan pemahaman tentang SAP

berbasis akrual tersebut? atau masih harus ditambah intensitasnya? Berapa kali dalam satu tahun?

- c. Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?

Informan triangulasi 1 menjelaskan bahwa: "Seingat saya dua kali yaitu pada tahun 2015 dan 2016 di Hotel Smart Kota Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau. Tetapi kalau saya pernah diundang oleh Kementerian Keuangan untuk mengikuti, Kursus Keuangan Daerah Khusus Akuntansi/Penatausahaan (KKDK) berbasis akrual di STAN Tangerang Selatan pada Tahun 2014". "Kalau menurut saya, sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD belum memberikan pemahaman yang maksimal karena sosialisasi/bimbingan teknis tersebut terlalu singkat untuk jumlah peserta yang begitu banyak. Ya... intensitasnya harus ditambah, minimal dua kali dalam setahun". "Kalau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau narasumbernya dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, sedangkan Kursus Keuangan Daerah Khusus Akuntansi/Penatausahaan (KKDK) yang saya ikuti narasumber yang memberikan materi yaitu dari Kementerian Keuangan dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)".

Informan triangulasi 2 menjelaskan bahwa: "Kalau tidak salah dua kali yaitu pada tahun 2015 dan 2016 di Hotel Smart Kota Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau". "Sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD belum cukup kerana diselenggarakan hanya tiga hari, sedangkan pesertanya seluruh entitas akuntansi yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, menurut saya sosialisasi/bimbingan teknis sejenis harus diperbanyak intensitasnya, minimal dua kali dalam setahun". "Narasumber yang memberikan materi yaitu dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

Informan triangulasi 3 menjelaskan bahwa: "Tahun 2015 satu kali dan 2016 satu kali, berarti dua kali Pak Rudi". "Belum, sosialisasi/bimbingan teknis tersebut belum memberikan pemahaman yang maksimal. Kalau menurut saya perlu ditambah intensitas sosialisasi/bimbingan teknisnya. Ya... kira-kira minimal dua kali dalam satu tahun". "Narasumber yang memberikan materi pada sosialisasi/bimbingan teknis dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

Informan triangulasi 4 menjelaskan bahwa: "Tidak pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual Pak Rudi, karena pada tahun 2015 saya sedang cuti dan berada diluar Kota Lubuklinggau, sedangkan pada tahun 2016 saya sakit dan dirawat di rumah sakit", "Ya ... saya tidak bisa menjawabnya karena saya belum pernah mengikuti, tapi saran saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual perlu diperbanyak intensitasnya agar dapat memberikan pemahaman yang lebih bagi teman-teman di entitas akuntansi".

Informan triangulasi 5 menjelaskan bahwa: "Pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis Dua kali, tahun 2015 dan 2016". "Menurut saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD masih kurang memberikan pemahaman karena dilakukan atau diselenggarakan hanya sekali dalam setahun. Setidaknya sosialisasi/bimbingan teknis tersebut diselenggarakan minimal dua kali dalam satu tahun anggaran", "Setahu saya, yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

Informan triangulasi 6 menjelaskan bahwa: "Saya mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sudah kira-kira empat kali. Dua kali di Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau tahun 2015 dan 2016, dan dua kali lagi saya mengikutinya di Jakarta pada tahun 2015 dan 2016 juga". "Menurut pendapat saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD belum bisa memberikan pemahaman kepada kawan-kawan pada entitas akuntansi karena diselenggarakan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran. Hendaknya sosialisasi/bimbingan teknis sejenis diselenggarakan sesering mungkin atau minimal per semester". "Kalau sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau narasumbernya dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. Namun sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang saya ikuti di Jakarta narasumbernya berasal dari Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan diklat terkait SAP berbasis akrual".

Informan triangulasi 7 menjelaskan bahwa: "Saya mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis dua kali di Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 dan 2016". "Kalau menurut saya, sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini

BPKAD masih perlu diperbanyak intensitasnya, agar bisa memberikan pemahaman yang lebih tentang SAP berbasis akrual". "Sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau narasumbernya dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan".

2. Indikator Sumber Daya

Dalam indikator sumber daya ini meliputi kuantitas, keahlian dari personil pelaksana, anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya implementasi secara sempurna. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana yang ada. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja. Sumber daya lain yang juga penting adalah anggaran untuk menunjang kebutuhan dalam rangka penerapan implementasi. Fasilitas seperti sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan implementasi harus terpenuhi seperti peralatan yang mencukupi, karena tanpa fasilitas mustahil implementasi ini dapat berjalan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan kunci yang di *cross check* dengan informasi dari Informan triangulasi. Pertanyaan yang diajukan kepada Informan kunci dan jawaban yang didapat adalah seperti yang tampak berikut ini:

- a. Berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada entitas pelaporan? atau Menurut bapak, apakah kuantitasnya personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan

- berbasis akrual sudah cukup? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
- b. Menurut bapak apakah personil yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memahami SAP berbasis akrual itu sendiri? Bagaimana dengan personil yang ada di entitas akuntansi?
 - c. Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
 - d. Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai? dan bagaimana dengan yang ada di entitas akuntansi?

Informan kunci 1 menjelaskan bahwa: "Kami menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau ini secara tim, melalui keputusan Walikota Lubuklinggau. Dan dibantu oleh tim asistensi dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. Tim asistensi ini juga membantu entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya". "Menurut pengamatan saya, tim yang menyusun laporan keuangan ini memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup baik mengenai standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Tetapi kalau personil yang ada di entitas akuntansi, kami tidak begitu mengetahuinya, tetapi dari data yang masuk yang melaporkan laporan keuangan pada tahun 2016, tidak ada entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan menggunakan basis akrual". "Saya rasa kalau masalah anggaran relatif ya, sepanjang ini kami dapat memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal juga". "Menurut saya sarana dan prasarana tersedia dan memadai baik di BPKAD sebagai entitas pelaporan maupun SKPD, BUMD, dan BLUD sebagai entitas akuntansi".

Informan kunci 2 menjelaskan bahwa: "Kalau dari jumlah atau kuantitas personil kami merasa cukup. Baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi, Apalagi kami dibantu oleh tim asistensi BPKP Perwakilan Sumatera Selatan". "SAP berbasis akrual inikan masih baru, pemahaman yang dimiliki personil terhadap basis akrual tidak merata baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi oleh karena itu masih harus ditingkatkan dengan cara mengikuti sosialisasi dan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga yang berkompeten lainnya". "Berkaitan dengan insentif.. cukup atau tidaknya tergantung kepada kita, maksudnya kalau diberikan anggaran lebih kami sangat berterima kasih, tetapi

kalau seperti sekarang ini kami pun tetap bisa melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau secara maksimal". "Menurut saya fasilitas pendukung berupa sarana maupun prasarana sudah cukup memadai baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi".

Informan kunci 3 menjelaskan bahwa: "kuantitasnya personil... Kalau menurut saya pribadi cukup, apalagi kita dibantu oleh tim asistensi dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan" ... Nah ini, personil yang memahami SAP berbasis akrual masih sedikit, baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi". "Anggaran yang disediakan ... Bisa dikatakan cukup, dengan kondisi keuangan Kota Lubuklinggau saat ini". "Ya, kalau sarana dan prasarana tersedia secara memadai".

Informan kunci 4 menjelaskan bahwa: "Menurut pengamatan saya kuantitas personil sudah cukup, baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi". "Pemahaman tentang SAP berbasis akrual masih kurang dan perlu ditingkatkan". "Anggarannya saya rasa tidak ada masalah" "Sarana dan prasarana tersedia secara memadai. Baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi".

Informan kunci 5 menjelaskan bahwa: "berkaitan jumlah personil... Ya ... sudah cukup Pak, kalau jumlah menurut saya sudah cukup". "Kalau dari jumlah sudah cukup, pemahaman tentang SAP berbasis akrual masih sedikit dan dimasa yang akan datang perlu ditingkatkan pemahaman tentang SAP berbasis akrualnya melalui kursus, bimtek atau sejenisnya yang lain". "Kalau anggaran cukup". "Sarana dan prasarana baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi sudah memadai dan dapat dikatakan lengkap".

Sedangkan pertanyaan yang diajukan kepada Informan triangulasi dan jawaban yang didapat adalah seperti yang tampak berikut ini:

- a. Kalau di Dinas Pendidikan/Dinas Perikanan dan Peternakan/Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
- b. Bagaimana pemahaman bapak mengenai SAP berbasis akrual itu sendiri?
- c. Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?

- d. Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?

Informan triangulasi 1 menjelaskan bahwa: "Mengenai penyusunan laporan keuangan, ini merupakan tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan, jadi kami semua terlibat. Jumlah kami seluruhnya ada 6 orang". " Menurut saya, SAP berbasis akrual ini masih baru jadi perlu di pelajari lebih lanjut sehingga mendapatkan pemahaman yang memadai". " Ya cukuplah, karena mau tak mau ini merupakan tupoksi kita, jadi harus diselesaikan". "Kalau sarana dan prasarana tersedia dan memadai sehingga dapat menunjang pekerjaan kami".

Informan triangulasi 2 menjelaskan bahwa: "Kami semua terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan jumlah kami sebanyak enam orang". "Saya belum begitu paham dengan SAP berbasis akrual, mungkin saya dan kami semua perlu mengikuti sejenis bimtek untuk menambah pemahaman kami tentang SAP berbasis akrual". "Cukup, walaupun masih perlu ditingkatkan tahun-tahun yang akan datang". "Ya, kalau sarana dan prasarana tersedia secara memadai".

Informan triangulasi 3 menjelaskan bahwa: "Jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual... Tiga orang, mereka adalah staf pada Sub Bagian Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan. Termasuk saya". " Walaupun penyusunan laporan keuangan adalah tupoksi saya selaku kasubag. keuangan namun saya masih butuh belajar lagi untuk memahami SAP berbasis akrual". "Mengenai anggaran ... Ya, cukup. Setidaknya ini menurut saya". "Kalau sarana dan prasarana cukup. Bahkan lebih dari cukup".

Informan triangulasi 4 menjelaskan bahwa: "Jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ... Tiga orang, dan saya mengelola data tentang pendapatan dari Dinas Perikanan dan Peternakan". "Masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual". "saya, tidak begitu paham tentang anggarannya, tapi setidaknya penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar". "Mengenai sarana dan prasarana ... Ya, sangat memadai".

Informan triangulasi 5 menjelaskan bahwa: "Jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ... Tiga orang, dan saya sebagai Bendahara Pengeluaran dari Dinas Perikanan dan Peternakan". "Belum begitu paham, masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual". "Saya rasa cukup karena penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar". "Mengenai sarana dan prasarana ... Cukup memadai".

Informan triangulasi 6 menjelaskan bahwa: "Jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ... Tiga orang, dan itu termasuk saya sebagai Kasubag. Keuangan". "Walaupun saya sudah sering mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tapi saya belum begitu paham, masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual. Ini mungkin karena saya bukan sarjana akuntansi, tapi saya merupakan sarjana komputer yang secara kebetulan ditugaskan sebagai Kasubag. Keuangan pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan I". "Berkaitan dengan anggaran... Cukup, karena penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang seharusnya.

Informan triangulasi 7 menjelaskan bahwa: "Ya ... Cuma kami ini, tiga orang, dan saya sebagai Bendahara Pengeluaran". "Saya belum begitu paham, masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual". "Saya kira cukup". "Sarana dan prasarana tersedia dan secara memadai".

3. Indikator Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap pelaksana implementasi. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dalam penelitian ini indikator disposisi atau sikap meliputi motivasi dan pemberian insentif bagi pelaksana implementasi. Dukungan dari pimpinan berupa motivasi dan insentif sangat mempengaruhi pelaksanaan implementasi sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tetapi mengenai insentif pada penelitian ini didapat fakta yaitu pelaksana implementasi ditingkat entitas akuntansi (seluruh SKPD, BUMD dan BLUD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau) tidak mendapatkan insentif seperti yang didapat oleh pelaksana implementasi ditingkat entitas pelaporan (dalam hal

ini yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau).

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan kunci yang di *cross check* dengan informasi dari Informan triangulasi. Pertanyaan yang diajukan kepada Informan kunci dan jawaban yang didapat adalah seperti yang tampak berikut ini:

- a. Bagaimana bapak memotivasi personil pelaksana baik di entitas pelaporan maupun entitas akuntansi agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
- b. Apakah ada insentif yang diberikan?

Informan kunci 1 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Saya melakukannya dengan pendekatan kekeluargaan dan saya berusaha memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang timbul didalam tim penyusunan laporan keuangan ini". "Ada, tetapi insentif yang diberikan berupa honorarium bagi tim penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan, tetapi untuk entitas akuntansi insentif tersebut belum bisa diberikan. Hal ini karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuklinggau".

Informan kunci 2 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi ... Kami selalu berdiskusi, berusaha memecahkan masalah-masalah yang timbul. Demikianlah kami semua saling menguatkan dan memotivasi satu dengan yang lain dan kami selalu memberikan kesempatan bagi kawan-kawan kami yang berada di entitas akuntansi untuk selalu berkoordinasi". "berkenaan dengan insentif... Dalam kondisi keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau seperti sekarang ini, yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan maka kami tetap merasa bersyukur atas insentif yang kami terima berupa honorarium, tetapi kami masih prihatin dengan kawan-kawan kami yang berada di entitas akuntansi karena mereka belum bisa diberikan insentif sebagai tambahan atas beban kerja penyusunan laporan keuangan".

Informan kunci 3 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Kami bekarja bahu-membahu dan saling pengertian sehingga tercipta tim yang solid yang memiliki motivasi yang tinggi". "Insentif yang diberikan berupa honorarium untuk tim entitas pelaporan, namun untuk entitas akuntansi belum bisa

direalisasikan. Mungkin karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Lubuklinggau".

Informan kunci 4 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi ... Selalu saling menghargai dan kompak baik atasan maupun bawahan". "berkenaan dengan insentif... Kami menerima honorarium untuk penyusunan laporan keuangan, tapi pada tingkatan entitas akuntansi belum ada insentif atau honorarium yang diberikan".

Informan kunci 5 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi ... Selalu saling menghargai satu dengan yang lain". "berkenaan dengan insentif... Kami bukan mendapatkan insentif, tapi honorarium tim penyusunan laporan keuangan. Tetapi untuk teman-teman di tingkat entitas akuntansi belum bisa mendapatkan insentif atau honorarium atas penyusunan laporan keuangan dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Lubuklinggau".

Sedangkan pertanyaan yang diajukan kepada Informan triangulasi dan jawaban yang didapat adalah seperti yang tampak berikut ini:

- a. Bagaimana bapak memotivasi diri sendiri dan personil pelaksana agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual SKPD ini?
- b. Apakah ada insentif yang diberikan?

Informan triangulasi 1 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi ...Saya melakukan pendekatan pertemanan, tidak ada atasan dan bawahan tetapi tetap saling menghargai". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada, tetapi kami mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD Kota Lubuklinggau".

Informan triangulasi 2 menjelaskan bahwa: "Cara kami memotivasi adalah sama-sama saling menghargai dan saling percaya dalam menyelesaikan tugas-tugas kami". "Tidak ada, kami mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dicairkan dua bulan sekali".

Informan triangulasi 3 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Cara kami memotivasi adalah sama-sama saling menghargai satu dengan yang lainnya". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada, tapi semua pegawai

dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sudah mendapatkan TPP yang dicairkan per dua bulan".

Informan triangulasi 4 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... sama-sama saling menghargai dan saling bekerja sama". "berkenaan dengan insentif ... Tidak ada".

Informan triangulasi 5 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Dengan cara bekerja sama, saling pengertian dan saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada".

Informan triangulasi 6 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Ya... bekerja sama, saling menghormati, saling pengertian dan saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada".

Informan triangulasi 7 menjelaskan bahwa: "berkenaan dengan motivasi... Bekerja sama, saling menghormati. saling pengertian dan saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya, seperti yang diungkapkan Pak Kasubag. Keuangan tadi". "berkenaan dengan insentif... Tidak ada".

4. Indikator Struktur Birokrasi

Salah satu hal penting dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan misalnya SOP pembuatan keputusan; SOP pertanggungjawaban kegiatan, SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya.

Namun demikian tetap harus diperhatikan bahwa pada beberapa hal SOP justru menimbulkan masalah. SOP adalah suatu standar penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar; padahal bisa jadi

masing-masing masalah yang dihadapi memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu implementasi dan para pelaksana implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Pada penelitian ini semua Informan kunci maupun Informan triangulasi menyatakan bahwa SOP mengenai pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tidak ada, namun pedoman peraturan yang dipakai adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang kebijakan akuntansi. Kemudian semua Informan kunci maupun Informan triangulasi menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan pembagian tugas dan koordinasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan kunci yang di *cross check* dengan informasi dari Informan triangulasi. Pertanyaan yang diajukan

kepada Informan kunci dan jawaban yang didapat adalah seperti yang tampak berikut ini:

- a. Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara universal dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau?
- b. Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?

Informan kunci 1 menjelaskan bahwa: "Kalau SOP mengenai pelaksanaan penyusunan laporan keuangan secara khusus tidak ada, tetapi kami memiliki kebijakan akuntansi yang diatur melalui Peraturan Walikota Lubuklinggau". "Sepanjang ini ya, pembegian tugas dan koordinasi berjalan lancar tidak ada hambatan yang berarti yang membuat tugas-tugas terkendala".

Informan kunci 2 menjelaskan bahwa: "Dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan kami belum memiliki SOP secara resmi tetapi memiliki peraturan Walikota Lubuklinggau yang mengatur tentang kebijakan akuntansi". "Sejauh ini bisa dikatakann pembagian tugas dan koordinasi berjalan dengan lancar tidak ada hal-hal yang signiftkan terjadi sehingga mengganggu pekerjaan kami".

Informan kunci 3 menjelaskan bahwa: "Secara khusus SOP belum kami miliki, tapi kami mengacu pada peraturan yang ada yang berlaku". "Ya pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan semestinya".

Informan kunci 4 menjelaskan bahwa: "SOP untuk tahapan proses penyusunan laporan keuangan belum kami miliki". "Ya ... pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan semestinya".

Informan kunci 5 menjelaskan bahwa: "Belum, kami belum memiliki SOP dimaksud". "Pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan lancar".

Sedangkan pertanyaan yang diajukan kepada Informan triangulasi dan jawaban yang didapat adalah seperti yang tampak berikut ini:

- a. Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
- b. Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?

Informan triangulasi 1 menjelaskan bahwa: "mengenai SOP ... Tidak, Kami hanya mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah, saya lupa nomor Peraturan Walikota nya". "Ya, pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan lancar".

Informan triangulasi 2 menjelaskan bahwa: "Kami tidak memiliki SOP berkaitan dengan penyelesaian penyusunan laporan keuangan". "Ya, pembagian tugas dan koordinasi tidak ada masalah tetap berjalan sebagaimana mestinya".

Informan triangulasi 3 menjelaskan bahwa: "Kami tidak memiliki SOP tentang penyusunan laporan keuangan". "Saya rasa ya, karena tidak ada kendala yang berarti mengenai pembagian tugas dan koordinasi, semuanya dapat kami atasi".

Informan triangulasi 4 menjelaskan bahwa: "Saya belum pernah melihat atau membaca adanya SOP dalam menyusun laporan keuangan". "Saya rasa ya. Pembagian tugas dan koordinasi tidak ada masalah".

Informan triangulasi 5 menjelaskan bahwa: "Kami belum memiliki SOP terkait menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual". "Iya, sudah berjalan dengan baik karena pembagian tugas dan koordinasi tidak ada masalah. Ini yang saya rasakan".

Informan triangulasi 6 menjelaskan bahwa: "SOP kami belum pernah membaca maupun memilikinya". "Iya, pembagian tugas dan koordinasi sejauh ini tidak ada masalah yang berarti, semuanya dapat diatasi".

Informan triangulasi 7 menjelaskan bahwa: "Belum, kami belum pernah membaca maupun memiliki SOP". "Iya, pembagian tugas dan koordinasi sejauh ini berjalan dengan lancar".

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Lubuklinggau yang diamanatkan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010 dan didukung dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai entitas pelaporan telah mengimplementasikan kebijakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam rangka penyajian laporan keuangan sejak tahun 2016 (audit laporan keuangan tahun anggaran 2015 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015). Hal ini dapat dilihat dengan indikator:

a. Komunikasi

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual Pemerintah Kota Lubuklinggau sudah dua kali menyelenggarakan sosialisasi/ bimbingan teknis, yang diikuti oleh seluruh entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.

b. Sumber Daya

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual Pemerintah Kota Lubuklinggau memiliki kuantitas personil pelaksana cukup dan anggaran yang disediakan juga cukup serta fasilitas pendukung baik

sarana dan prasarana tersedia secara memadai, baik di entitas pelaporan maupun entitas akuntansi.

c. Disposisi atau Sikap

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual personil pelaksana membangun motivasi dengan baik menggunakan pendekatan kekeluargaan, rasa saling menghargai, dan rasa saling menghormati.

d. Struktur Birokrasi

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual personil pelaksana melakukan pembagian tugas dan koordinasi sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak ditemui kendala yang berarti.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

1. Komunikasi

Pemerintah Kota Lubuklinggau sudah dua kali menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diikuti oleh seluruh entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi/bimbingan teknis adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.

2. Sumber Daya

Jumlah atau kuantitas personil pelaksana cukup. Anggaran yang disediakan juga cukup dan fasilitas pendukung baik sarana dan

maupun prasarana tersedia dan memadai, baik di entitas pelaporan maupun entitas akuntansi.

3. Disposisi atau Sikap

Motivasi yang dibangun antara personil pelaksana baik ditingkat pimpinan maupun jajaran dibawahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan, rasa saling menghargai, dan rasa saling menghormati.

4. Struktur Birokrasi

Pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan dan tidak ditemui kendala yang berarti.

b. Faktor penghambat

1. Komunikasi

Penyelenggaraan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual masih dianggap kurang bagi personil yang berada di entitas akuntansi.

2. Sumber Daya

Pemahaman yang dimiliki personil terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis akrual masih kurang dan tidak merata baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi.

3. Disposisi atau Sikap

Insentif berupa honorarium hanya diberikan kepada personil yang berada di entitas pelaporan saja, sedangkan personil yang berada di entitas akuntansi belum diberikan insentif atau honorarium sebagai tambahan atas beban kerja penyusunan laporan keuangan.

4. Struktur Birokrasi

Pemerintah Kota Lubuklinggau belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang berlaku secara universal dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis atau kursus-kursus dengan intensitas yang lebih banyak lagi demi meningkatkan kemampuan pemahaman personil pelaksana penyusunan laporan keuangan tentang standar akuntansi berbasis akrual.
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang berlaku secara universal dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau, 2017 Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Lubuklinggau. Diakses 22 Maret 2017, dari situs World Wide Web: <https://lubuklinggaukota.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/2>
- Bagian Organisasi Setda Kota Lubuklinggau, 2014. Gambaran Umum Kota Lubuklinggau. Diakses 22 Maret 2017, dari situs World Wide Web: <http://www.lubuklinggaukota.go.id/topic.html?t=5>
- Hamdi, M. & Ismaryati, S. (2014). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2006). Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Diunduh 22 Maret 2017, dari situs World Wide Web: <http://www.ksap.org/memorandum.pdf>
- Langelo, F, Saerang, D. P.E., Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, vol.3, no.1, 1-8.
- Kusuma, M.I.Y, Fuad (2013) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrua Pada Pemerintah. *Diponogoro Journal Of Accounting* Vol.2, No.1.
- Muhidin, Sambas Ali, 2011. Bagaimanakah Menyusun Kerangka Berpikir Penelitian?. Diakses 22 Maret 2017, dari situs World Wide Web: <http://sambas.staf.upi.edu/2013/01/16/bagaimanakah-menyusun-kerangka-berpikir-penelitian/>.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prosojo, E. dkk. (2015). *Pemerintahan Daerah, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.

- Rahmawati. N, Made. A, Wirsandono. D. (2016) Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Malang: Universitas Kanjuruhan
- Simanjuntak, Binsar H. 2005. *Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Diunduh 22 Maret 2017, dari situs World Wide Web: <http://www.ksap.org/sap/menyongsong-era-baru-akuntansipemerintahan-di-indonesia/>.
- Sitorus. S, Kalangi. L, Walandouw. S. K. (2015) Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan PP. No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, vol.3, no.1, 941-949
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. Purnaweni, H, & Kismartini. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah



Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA
DITUJUKAN UNTUK INFORMAN KUNCI ...**

Tanggal Wawancara :

Nama Informan :

Jabatan :

Satuan Kerja :

A. Indikator Komunikasi

1. Berapa kali Pemerintah Kota Lubuklinggau pernah melakukan sosialisasi /bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
2. Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?

B. Indikator Sumber daya

1. Berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
2. Menurut bapak apakah personil yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memahami SAP berbasis akrual itu sendiri?
3. Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
4. Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?

C. Indikator Disposisi atau sikap

- a. Bagaimana bapak memotivasi personil pelaksana agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
- b. Apakah ada insentif yang diberikan?

D. Indikator Struktur Birokrasi

- a. Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
- b. Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?

Lampiran 2

**PEDOMAN WAWANCARA
DITUJUKAN UNTUK INFORMAN KUNCI ...**

Tanggal Wawancara :

Nama Informan :

Jabatan :

Satuan Kerja :

A. Indikator Komunikasi

1. Apakah bapak pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
2. Dimana? dan siapa saja atau dari instansi manakah narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?

B. Indikator Sumber daya

1. Menurut bapak, apakah kuantitasnya personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sudah cukup?
2. Menurut bapak apakah personil yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memahami SAP berbasis akrual itu sendiri?
3. Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
4. Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?

C. Indikator Disposisi atau sikap

- a. Bagaimana bapak memotivasi personil pelaksana agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
- b. Apakah insentif yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan?

D. Indikator Struktur Birokrasi

- a. Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
- b. Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?

Lampiran 3

**PEDOMAN WAWANCARA
DITUJUKAN UNTUK INFORMAN TRIANGULASI ...**

Tanggal Wawancara :

Nama Informan :

Jabatan :

Satuan Kerja :

didinkd

A. Indikator Komunikasi

1. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Berapa kali anda pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
2. Apakah sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD sudah cukup memberikan pemahaman tentang SAP berbasis akrual tersebut? atau masih harus ditambah intensitasnya? Berapa kali dalam satu tahun?
3. Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?

B. Indikator Sumber daya

1. Kalau di Dinas, berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
2. Bagaimana pemahaman bapak mengenai SAP berbasis akrual itu sendiri?
3. Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
4. Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?

C. Indikator Disposisi atau sikap

- a. Bagaimana bapak memotivasi diri sendiri dan personil pelaksana agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual SKPD ini?
- b. Apakah ada insentif yang diberikan?

D. Indikator Struktur Birokrasi

- a. Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
- b. Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?



Lampiran 4

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN KUNCI - 1**

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2017

Nama Informan : Imam Senen, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Satuan Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Lubuklinggau

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Pak Imam... Maaf Pak sebelumnya kalau kehadiran saya mengganggu.
Informan Kunci 1	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh, ah tidak Pak Rudi, silahkan apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tugas akhir yaitu tesis dalam menyelesaikan studi S2 saya Pak.
Informan Kunci 1	Oh iya, silahkan...
Peneliti	Baik Pak, terima kasih....
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Berapa kali Pemerintah Kota Lubuklinggau pernah melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 1	Pemerintah Kota Lubuklinggau selama ini sudah dua kali menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis yaitu pada tahun 2015 dan 2016, dengan peserta yang diundang adalah Pengguna

	<p>anggaran, Kasubag. Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran semua SKPD, BUMD dan BLUD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang merupakan entitas akuntansi.</p>
Peneliti	<p>Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?</p>
Informan Kunci 1	<p>Narasumber yang kami ajak kerja sama untuk memberikan materi adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.</p>
<p>Indikator Sumber daya</p>	
Peneliti	<p>Berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada entitas pelaporan?</p>
Informan Kunci 1	<p>Kami menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau ini secara tim, melalui keputusan Walikota Lubuklinggau. Dan dibantu oleh tim asistensi dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. Tim asistensi ini juga membantu entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya.</p>
Peneliti	<p>Menurut bapak apakah personil yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memahami SAP berbasis akrual itu sendiri? Bagaimana dengan personil yang ada di entitas akuntansi?</p>
Informan Kunci 1	<p>Menurut pengamatan saya, tim yang menyusun laporan keuangan ini memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup baik mengenai standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Tetapi kalau personil yang ada di entitas akuntansi, kami tidak begitu mengetahuinya, tetapi dari data yang masuk yang</p>

	melaporkan laporan keuangan pada tahun 2016, tidak ada entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan menggunakan basis akrual.
Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 1	Saya rasa kalau masalah anggaran relatif ya, sepanjang ini kami dapat memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal juga.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai? dan bagaimana dengan yang ada di entitas akuntansi?
Informan Kunci 1	Menurut saya, sarana dan prasarana tersedia dan memadai baik di BPKAD sebagai entitas pelaporan maupun SKPD, BUMD dan BLUD sebagai entitas akuntansi.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana bapak memotivasi personil pelaksana baik di entitas pelaporan maupun entitas akuntansi agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 1	Saya melakukannya dengan pendekatan kekeluargaan dan saya berusaha memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang timbul didalam tim penyusunan laporan keuangan ini.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan?
Informan Kunci 1	Ada, tetapi insentif yang diberikan berupa honorarium bagi tim

	<p>penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan, tetapi untuk entitas akuntansi insentif tersebut belum bisa diberikan. Hal ini karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuklinggau.</p>
<p>Indikator Struktur Birokrasi</p>	
Peneliti	<p>Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara universal dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau?</p>
Informan Kunci 1	<p>Kalau SOP mengenai pelaksanaan penyusunan laporan keuangan secara khusus tidak ada, tetapi kami memiliki kebijakan akuntansi yang diatur melalui Peraturan Walikota Lubuklinggau.</p>
Peneliti	<p>Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?</p>
Informan Kunci 1	<p>Sepanjang ini ya, pembagian tugas dan koordinasi berjalan lancar tidak ada hambatan yang berarti yang membuat tugas-tugas terkendala.</p>
<p>Penutup</p>	
Peneliti	<p>Terima kasih Pak atas kesempatan wawancara yang telah diberikan, saya berharap ini bermanfaat. Jika masih ada data yang kami perlukan pakenankan dan izinkan kami untuk memintanya lagi.</p>
Informan Kunci 1	<p>Iya Pak Rudi, silahkan hubungi saya kapan saja jika diperlukan.</p>

Lampiran 5

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN KUNCI - 2**

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2017

Nama Informan : Ahmad Fauzi, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pembukuan

Satuan Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Lubuklinggau

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Pak Fauzi,
Informan Kunci 2	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh oh Pak Rudi, apa kabar, apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Kabar saya baik Pak... Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam menyelesaikan studi S2 saya Pak.
Informan Kunci 2	Boleh-boleh... silahkan saja...
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Baik Pak, terima kasih.... Apakah bapak pernah mengikuti dan atau menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 2	Ya, kami sudah dua kali menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diikuti oleh seluruh entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Peneliti	Dimana? dan siapa saja atau dari instansi manakah narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?
Informan Kunci 2	Ya disini, di Kota Lubuklinggau, narasumber dalam sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yang kami undang untuk memberikan materi mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Indikator Sumber daya	
Peneliti	Menurut bapak, apakah kuantitasnya personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sudah cukup? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 2	Kalau dari jumlah atau kuantitas personil kami merasa cukup, baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi. Apalagi kami dibantu oleh tim asistensi BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
Peneliti	Menurut bapak apakah personil yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memahami SAP berbasis akrual itu sendiri? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 2	SAP berbasis akrual inikan masih baru, pemahaman yang dimiliki personil terhadap basis akrual tidak merata baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi oleh karena itu masih harus

	ditingkatkan dengan cara mengikuti sosialisasi dan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga yang berkompeten lainnya.
Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 2	Cukup atau tidaknya tergantung kepada kita, maksudnya kalau diberikan anggaran lebih kami sangat berterima kasih, tetapi kalau seperti sekarang ini kami pun tetap bisa melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau secara maksimal.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 2	Menurut saya fasilitas pendukung berupa sarana maupun prasarana sudah cukup memadai baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana bapak memotivasi personil pelaksana baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 2	Kami selalu berdiskusi, berusaha memecahkan masalah-masalah yang timbul. Demikianlah kami semua saling menguatkan dan memotivasi satu dengan yang lain dan kami selalu memberikan kesempatan bagi kawan-kawan kami yang berada di entitas akuntansi untuk selalu berkoordinasi.

Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan?
Informan Kunci 2	Dalam kondisi keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau seperti sekarang ini, yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan maka kami tetap merasa bersyukur atas insentif yang kami terima berupa honorarium, tetapi kami masih prihatin dengan kawan-kawan kami yang berada di entitas akuntansi karena mereka belum bisa diberikan insentif sebagai tambahan atas beban kerja penyusunan laporan keuangan.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara universal dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau?
Informan Kunci 2	Dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan kami belum memiliki SOP secara resmi tetapi memiliki peraturan Walikota Lubuklinggau yang mengatur tentang kebijakan akuntansi.
Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Kunci 2	Sejauh ini bisa dikatakan pembagian tugas dan koordinasi berjalan dengan lancar tidak ada hal-hal yang signifikan terjadi sehingga mengganggu pekerjaan kami.
Penutup	
Peneliti	Terima kasih Pak Fauzi atas waktu dan kesempatan wawancara ini.
Informan Kunci 2	Iya Pak Rudi, sama-sama.

Lampiran 6

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN KUNCI - 3**

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2017

Nama Informan : Lisma Agustini., S.E

Jabatan : Kepala Seksi Pembukuan Pendapatan

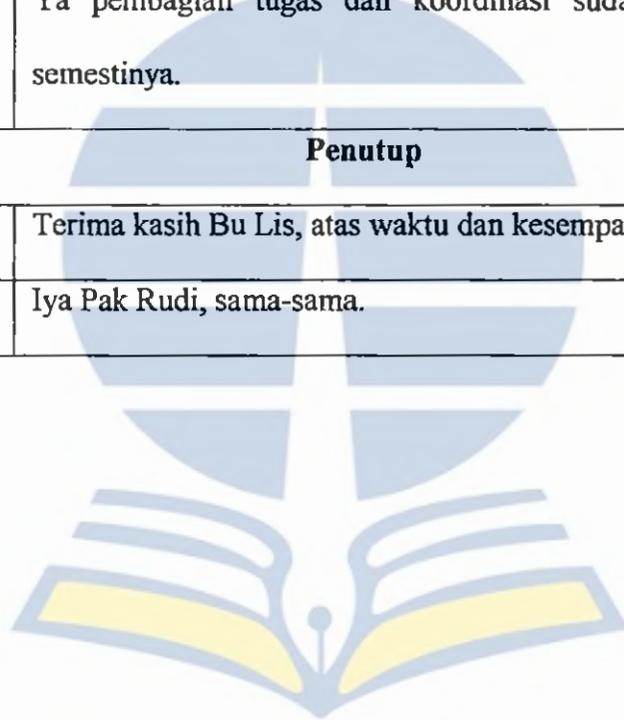
Satuan Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Lubuklinggau

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Bu Lisma,
Informan Kunci 3	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam menyelesaikan studi S2 saya Bu... .Apakah Ibu ada waktu sekarang?
Informan Kunci 3	Iya boleh-boleh... silahkan saja...
Peneliti	Baik Bu, terima kasih....
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Apakah ibu pernah mengikuti dan atau menyelenggarakan sosialisasi/ bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 3	Pemerintah Kota Lubuklinggau pernah menyelenggarakan sosialisasi /bimbingan teknis sebanyak dua kali yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, yang diikuti seluruh entitas akuntansi yang ada

	dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Selain dari itu kalau saya pernah mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis laporan keuangan berbasis akrual, beberapa kali di luar Kota Lubuklinggau.
Peneliti	Dimana? dan siapa saja atau dari instansi manakah narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?
Informan Kunci 3	Dua kali disini di Lubuklinggau dan yang lainnya di Palembang dan Jakarta yang diselenggarakan BPKP dan Kementerian Keuangan, itu pun atas undangan instansi terkait.
Indikator Sumber daya	
Peneliti	Menurut Ibu, apakah kuantitasnya personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sudah cukup? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 3	Kalau menurut saya pribadi cukup, apalagi kita dibantu oleh tim asistensi dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
Peneliti	Menurut Ibu apakah personil yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memahami SAP berbasis akrual itu sendiri? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 3	Nah ini, personil yang memahami SAP berbasis akrual masih sedikit, baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi.

Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 3	Bisa dikatakan cukup, dengan kondisi keuangan Kota Lubuklinggau saat ini.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 3	Ya, kalau sarana dan prasaran tersedia secara memadai baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana Ibu memotivasi personil pelaksana baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 3	Kami bekarja bahu-membahu dan saling pengertian sehingga tercipta tim yang solid yang memiliki motivasi yang tinggi.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan?
Informan Kunci 3	Insentif yang diberikan berupa honorarium untuk tim entitas pelaporan, namun untuk entitas akuntansi belum bisa direalisasikan. Mungkin karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)

	yang berlaku secara universal dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau?
Informan Kunci 3	SOP untuk tahapan proses penyusunan laporan keuangan belum kami tidak milikinya, tapi kami mengacu pada peraturan yang ada yang berlaku.
Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Kunci 3	Ya pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan semestinya.
Penutup	
Peneliti	Terima kasih Bu Lis, atas waktu dan kesempatan wawancara ini.
Informan Kunci 3	Iya Pak Rudi, sama-sama.



Lampiran 7

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN KUNCI - 4**

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2017

Nama Informan : Agus Dwiyatmoko, S.E

Jabatan : Kepala Seksi Pembukuan Belanja

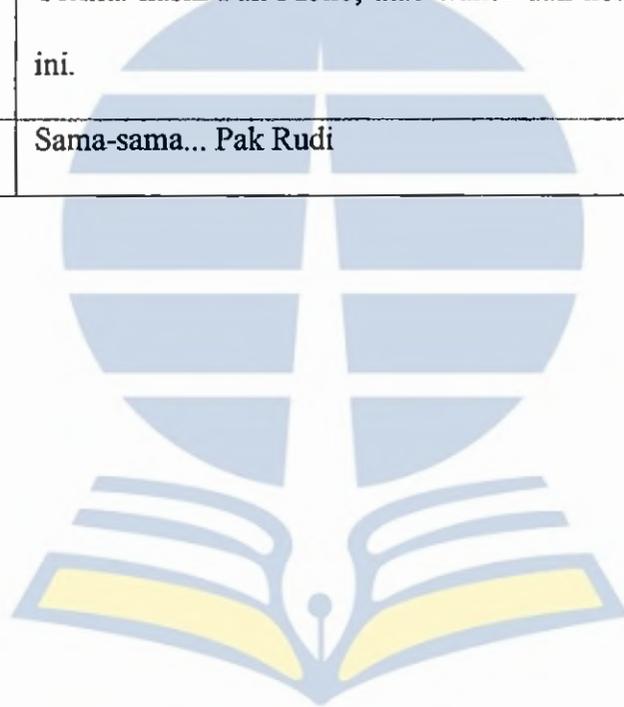
Satuan Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Lubuklinggau

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Pak Moko....
Informan Kunci 4	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh Apakabar Pak Rudi, apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Kabar baik Pak... Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam menyelesaikan studi S2 saya Bu... .Apakah bisa Pak?
Informan Kunci 4	Apa yang tidak bisa untuk Pak Rudi... silahkan saja...
Peneliti	Terima kasih, Pak..
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Apakah bapak pernah mengikuti dan atau menyelenggarakan sosialisasi/ bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 4	Ya, Pemerintah Kota Lubuklinggau pernah menyelenggarakan sosialisasi/ bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan

	berbasis akrual, Pak Rudi. Saya sendiri pernah mengikutinya sebanyak empat kali. Dua kali di Lubuklinggau, satu kali di Palembang dan satu kali lagi di Jakarta.
Peneliti	Dimana? dan siapa saja atau dari instansi manakah narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?
Informan Kunci 4	Dua kali disini di Lubuklinggau dengan narasumber BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, yang di Palembang diadakan oleh Provinsi Sumatera Selatan dan di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
Indikator Sumber daya	
Peneliti	Menurut Bapak, apakah kuantitasnya personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sudah cukup? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 4	Menurut pengamatan saya kuantitas personil sudah cukup, baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi.
Peneliti	Menurut Bapak apakah personil yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memahami SAP berbasis akrual itu sendiri? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 4	Pemahaman tentang SAP berbasis akrual masih kurang dan perlu ditingkatkan.

Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 4	Anggarannya saya rasa tidak ada masalah.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 4	Sarana dan prasaran tersedia secara memadai. Baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana Bapak memotivasi personil pelaksana baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 4	Selalu saling menghargai baik dengan atasan maupun bawahan.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan?
Informan Kunci 4	Kami menerima honorarium untuk penyusunan laporan keuangan, tapi pada tingkatan entitas akuntansi belum ada insentif atau honorarium yang diberikan.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara universal dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau?

Informan Kunci 4	SOP untuk tahapan proses penyusunan laporan keuangan belum kami tidak milikinya.
Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Kunci 4	Ya... pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan semestinya.
Penutup	
Peneliti	Terima kasih Pak Moko, atas waktu dan kesempatan wawancara ini.
Informan Kunci 4	Sama-sama... Pak Rudi



Lampiran 8

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN KUNCI - 5**

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2017

Nama Informan : Nuzul Edwar, S.E

Jabatan : Kepala Seksi Pelaporan

Satuan Kerja : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Lubuklinggau

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Bu Nuzul...
Informan Kunci 5	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh Apa yang bisa saya bantu, Pak Rudi?
Peneliti	Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam menyelesaikan studi S2 saya Bu... ..Apakah Ibu ada waktu sekarang?
Informan Kunci 5	Ada... silahkan saja...
Peneliti	Baik Bu, terima kasih...
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Apakah Ibu pernah mengikuti dan atau menyelenggarakan sosialisasi/ bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 5	Kami pernah menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual Pak, saya mengikutinya sebanyak dua kali.

Peneliti	Dimana? dan siapa saja atau dari instansi manakah narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?
Informan Kunci 5	Dua kali disini di Lubuklinggau dengan narasumber BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
Indikator Sumber daya	
Peneliti	Menurut Ibu, apakah kuantitasnya personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sudah cukup? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 5	Ya... sudah cukup Pak, kalau jumlah menurut saya sudah cukup.
Peneliti	Menurut Ibu apakah personil yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memahami SAP berbasis akrual itu sendiri? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?
Informan Kunci 5	Kalau dari jumlah sudah cukup, pemahaman tentang SAP berbasis akrual masih sedikit dan dimasa yang akan datang perlu ditingkatkan pemahaman tentang SAP berbasis akrualnya melalui kursus, bimtek atau sejenisnya yang lain.
Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 5	Kalau anggaran cukup.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai? baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi?

Informan Kunci 5	Sarana dan prasaran baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi sudah memadai dan dapat dikatakan lengkap.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana Ibu memotivasi personil pelaksana baik di tingkat entitas pelaporan maupun entitas akuntansi agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Kunci 5	Selalu saling menghargai satu dengan yang lain.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan?
Informan Kunci 5	Kami bukan mendapatkan insentif, tapi honorarium tim penyusunan laporan keuangan. Tetapi untuk teman-teman di tingkat entitas akuntansi belum bisa mendapatkan insentif atau honorarium atas penyusunan laporan keuangan dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku secara universal dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau?
Informan Kunci 5	Belum, kami belum memiliki SOP dimaksud.
Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Kunci 5	Pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan lancar.

Penutup	
Peneliti	Terima kasih Bu Nuzul, atas waktu dan kesempatan wawancara ini.
Informan Kunci 5	Iya... sama-sama.



Lampiran 9

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN TRIANGULASI - 1**

Hari, Tanggal Wawancara : 22 Maret 2017

Nama Informan : Bedy Subara, S.P

Jabatan : Kasubag. Keuangan

Satuan Kerja : Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Pak Bedy... Maaf Pak sebelumnya kalau kehadiran saya mengganggu.
Informan Triangulasi 1	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh, Wah... Pak Rudi, silahkan apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tugas akhir yaitu tesis dalam menyelesaikan studi S2 saya Pak.
Informan Triangulasi 1	Oh iya, silahkan...
Peneliti	Baik, terima kasih....
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis aktual, Berapa kali anda pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis aktual?
Informan Triangulasi 1	Seingat saya dua kali yaitu pada tahun 2015 dan 2016 di Hotel Smart Kota Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau. Tetapi kalau saya pernah diundang oleh Kementerian Keuangan untuk mengikuti, Kursus Keuangan

	Daerah Khusus Akuntansi/Penatausahaan (KKDK) berbasis akrual di STAN Tangerang Selatan pada Tahun 2014.
Peneliti	Apakah sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD sudah cukup memberikan pemahaman tentang SAP berbasis akrual tersebut? atau masih harus ditambah intensitasnya? Berapa kali dalam satu tahun?
Informan Triangulasi 1	Kalau menurut saya, sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD belum memberikan pemahaman yang maksimal karena sosialisasi/bimbingan teknis tersebut terlalu singkat untuk jumlah peserta yang begitu banyak. Ya... intensitasnya harus ditambah, minimal dua kali dalam setahun.
Peneliti	Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?
Informan Triangulasi 1	Kalau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau narasumbernya dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, sedangkan Kursus Keuangan Daerah Khusus Akuntansi/Penatausahaan (KKDK) yang saya ikuti narasumber yang memberikan materi yaitu dari Kementerian Keuangan dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Indikator Sumber daya	
Peneliti	Kalau di Dinas Pendidikan, berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 1	Mengenai penyusunan laporan keuangan, ini merupakan tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan, jadi kami semua terlibat. Jumlah kami seluruhnya ada 6 orang.
Peneliti	Bagaimana pemahaman bapak mengenai SAP berbasis akrual itu sendiri?
Informan Triangulasi 1	Menurut saya, SAP berbasis akrual inikan masih baru jadi perlu di pelajari lebih lanjut sehingga mendapatkan pemahaman yang memadai.
Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 1	Ya.... cukuplah, karena mau tak mau ini merupakan tupoksi kita, jadi harus diselesaikan.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?
Informan Triangulasi 1	Kalau sarana dan prasarana tersedia dan memadai sehingga dapat menunjang pekerjaan kami.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana bapak memotivasi diri sendiri dan personil pelaksana agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual SKPD ini?
Informan Triangulasi 1	Saya melakukan pendekatan pertemanan, tidak ada atasan dan bawahan tetapi tetap saling menghargai.

Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan?
Informan Triangulasi 1	Tidak ada, tetapi kami mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bersumber dari APBD Kota Lubuklinggau.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
Informan Triangulasi 1	Tidak, Kami hanya mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah, saya lupa nomor peraturan walikota nya.
Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Triangulasi 1	Ya, pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan lancar.
Penutup	
Peneliti	Terima kasih Pak Bedy atas kesempatan wawancara yang telah diberikan, saya berharap ini bermanfaat. Jika masih ada data yang kami perlukan pekenankan dan izinkan kami untuk bertanya lagi.
Informan Triangulasi 1	Iya Pak Rudi, silahkan hubungi saya kapan saja jika diperlukan.

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN TRIANGULASI - 2**

Hari, Tanggal Wawancara : 22 Maret 2017

Nama Informan : Eko Fitrianto

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

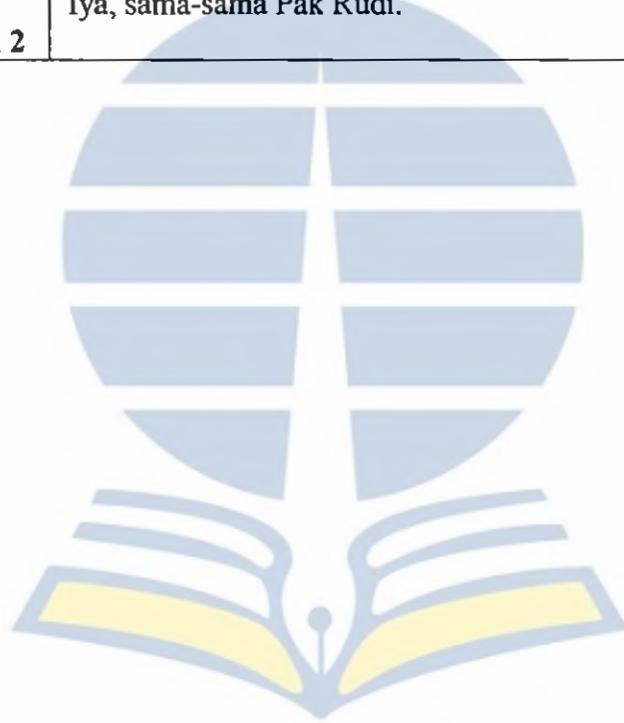
Satuan Kerja : Dinas Pendidikan

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Pak David... Maaf Pak mengganggu ,,-
Informan Triangulasi 2	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh, Silahkan Pak Rudi, apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam rangka menyelesaikan studi S2 saya Pak.
Informan Triangulasi 2	Oh iya, silahkan...Pak.
Peneliti	Baik, terima kasih....
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Berapa kali anda pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 2	Kalau tidak salah dua kali yaitu pada tahun 2015 dan 2016 di Hotel Smart Kota Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau.
Peneliti	Apakah sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh

	Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD sudah cukup memberikan pemahaman tentang SAP berbasis akrual tersebut? atau masih harus ditambah intensitasnya? Berapa kali dalam satu tahun?
Informan Triangulasi 2	Sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD belum cukup kerana diselenggarakan hanya tiga hari, sedangkan pesertanya seluruh entitas akuntansi yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, menurut saya sosialisasi/bimbingan teknis sejenis harus diperbanyak intensitasnya, minimal dua kali dalam setahun.
Peneliti	Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?
Informan Triangulasi 2	Narasumber yang memberikan materi yaitu dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
Indikator Sumber daya	
Peneliti	Kalau di Dinas Pendidikan, berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 2	Kami semua terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan jumlah kami sebanyak enam orang.
Peneliti	Bagaimana pemahaman anda mengenai SAP berbasis akrual itu sendiri?
Informan Triangulasi 2	Saya belum begitu paham dengan SAP berbasis akrual, mungkin saya dan kami semua perlu mengikuti sejenis bimtek

	untuk menambah pemahaman kami tentang SAP berbasis akrual.
Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 2	Cukup, walaupun masih perlu ditingkatkan tahun-tahun yang akan datang.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?
Informan Triangulasi 2	Ya, kalau sarana dan prasarana tersedia secara memadai.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana bapak memotivasi diri sendiri dan personil pelaksana lainnya agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual SKPD ini?
Informan Triangulasi 2	Cara kami memotivasi adalah sama-sama saling menghargai dan saling percaya dalam menyelesaikan tugas-tugas kami.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan?
Informan Triangulasi 2	Tidak ada, kami mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dicairkan dua bulan sekali.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
Informan Triangulasi 2	Kami tidak memiliki SOP berkaitan dengan penyelesaian penyusunan laporan keuangan.

Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Triangulasi 2	Ya, pembagian tugas dan koordinasi tidak ada masalah, tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Penutup	
Peneliti	Terima kasih Pak David atas kesempatan wawancara yang telah diberikan, semoga Pak David selalu sukses.
Informan Triangulasi 2	Iya, sama-sama Pak Rudi.



Lampiran 11

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN TRIANGULASI - 3**

Hari, Tanggal Wawancara : 24 Maret 2017

Nama Informan : Neti Suherawati, S.E

Jabatan : Kasubag Keuangan

Satuan Kerja : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Bu Neti... Maaf Bu, mengganggu ..
Informan Triangulasi 3	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh, Masuk Pak Rudi, apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam rangka menyelesaikan studi S2 saya Bu.
Informan Triangulasi 3	Beloh Pak, silahkan...
Peneliti	Baik, terima kasih....
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Berapa kali anda pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 3	Tahun 2015 satu kali dan 2016 satu kali, berarti dua kali Pak Rudi.
Peneliti	Apakah sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh

	Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD sudah cukup memberikan pemahaman tentang SAP berbasis akrual tersebut? atau masih harus ditambah intensitasnya? Kira-kira berapa kali dalam satu tahun?
Informan Triangulasi 3	Belum, sosialisasi/bimbingan teknis tersebut belum memberikan pemahaman yang maksimal. Kalau menurut saya perlu ditambah intensitas sosialisasi/bimbingan teknisnya. Ya... kira-kira minimal dua kali dalam satu tahun.
Peneliti	Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?
Informan Triangulasi 3	Narasumber yang memberikan materi pada sosialisasi/bimbingan teknis dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
Indikator Sumber daya	
Peneliti	Kalau di Dinas Perikanan dan Peternakan, berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 3	Tiga orang, mereka adalah staf pada Sub Bagian Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan. Termasuk saya.
Peneliti	Bagaimana pemahaman anda mengenai SAP berbasis akrual itu sendiri?
Informan Triangulasi 3	Walaupun penyusunan laporan keuangan adalah tupoksi saya selaku kasubag. keuangan namun saya masih butuh belajar lagi untuk memahami SAP berbasis akrual.

Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 3	Ya, cukup. Setidaknya ini menurut saya.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?
Informan Triangulasi 3	Kalau sarana dan prasarana cukup. Bahkan lebih dari cukup.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana Ibu memotivasi diri sendiri dan personil pelaksana lainnya agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual SKPD ini?
Informan Triangulasi 3	Cara kami memotivasi adalah sama-sama saling menghargai satu dengan yang lainnya.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan?
Informan Triangulasi 3	Tidak ada, tapi semua pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sudah mendapatkan TPP yang dicairkan per dua bulan.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
Informan Triangulasi 3	Kami tidak memiliki SOP tentang penyusunan laporan keuangan.
Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Triangulasi 3	Saya rasa ya, karena tidak ada kendala yang berarti mengenai pembagian tugas dan koordinasi, semuanya dapat kami atasi.

Penutup	
Peneliti	Terima kasih Ibu Neti atas kesempatan wawancara yang telah diberikan, semoga sukses selalu menyertai Ibu.
Informan Triangulasi 3	Sama-sama, semoga kita semua selalu sukses.



Lampiran 12

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN TRIANGULASI - 4**

Hari, Tanggal Wawancara : 24 Maret 2017

Nama Informan : Yusdianto, S.Pt

Jabatan : Bendahara Penerimaan

Satuan Kerja : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Pak Yusdi... Maaf Pak, mengganggu...
Informan Triangulasi 4	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh, Masuk Pak Rudi, apa kabar? apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Kabar saya baik Pak, Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam rangka menyelesaikan studi S2 saya Pak.
Informan Triangulasi 4	Oh begitu, silahkan...
Peneliti	Baik, terima kasih....
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis aktual, Berapa kali anda pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis aktual?
Informan Triangulasi 4	Tidak pernah Pak Rudi, karena pada tahun 2015 saya sedang cuti dan berada diluar Kota Lubuklinggau, sedangkan pada tahun 2016 saya sakit dan dirawat di rumah sakit.

Peneliti	Apakah sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD sudah cukup memberikan pemahaman tentang SAP berbasis akrual tersebut? atau masih harus ditambah intensitasnya? Kira-kira berapa kali dalam satu tahun?
Informan Triangulasi 4	Ya... Saya tidak bisa menjawabnya karena saya belum pernah mengikuti, tapi saran saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual perlu diperbanyak intensitasnya agar dapat memberikan pemahaman yang lebih bagi teman-teman di entitas akuntansi.
Indikator Sumber daya	
Peneliti	Kalau di Dinas Perikanan dan Peternakan, berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 4	Tiga Orang, dan saya mengelola data tentang pendapatan dari Dinas Perikanan dan Peternakan.
Peneliti	Bagaimana pemahaman anda mengenai SAP berbasis akrual itu sendiri?
Informan Triangulasi 4	Masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual.
Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?

Informan Triangulasi 4	saya.... tidak begitu paham tentang anggaranya. Tapi setidaknya penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?
Informan Triangulasi 4	Ya, sangat memadai
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana Bapak memotivasi diri sendiri dan personil pelaksana lainnya agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis aktual SKPD ini?
Informan Triangulasi 4	Sama-sama saling menghargai dan saling bekerjasama.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan?
Informan Triangulasi 4	Tidak ada
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis aktual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
Informan Triangulasi 4	Tidak, Kami hanya mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah, saya lupa nomor peraturan walikota nya.
Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Triangulasi 4	Ya, pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan lancar.

Penutup	
Peneliti	Terima kasih Pak Yusdi atas kesempatan wawancara yang telah diberikan, semoga sukses selalu menyertai Bapak.
Informan Triangulasi 4	Iya, sama-sama Pak.



Lampiran 13

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN TRIANGULASI - 5**

Hari, Tanggal Wawancara : 24 Maret 2017

Nama Informan : Fery Herita, Sp

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

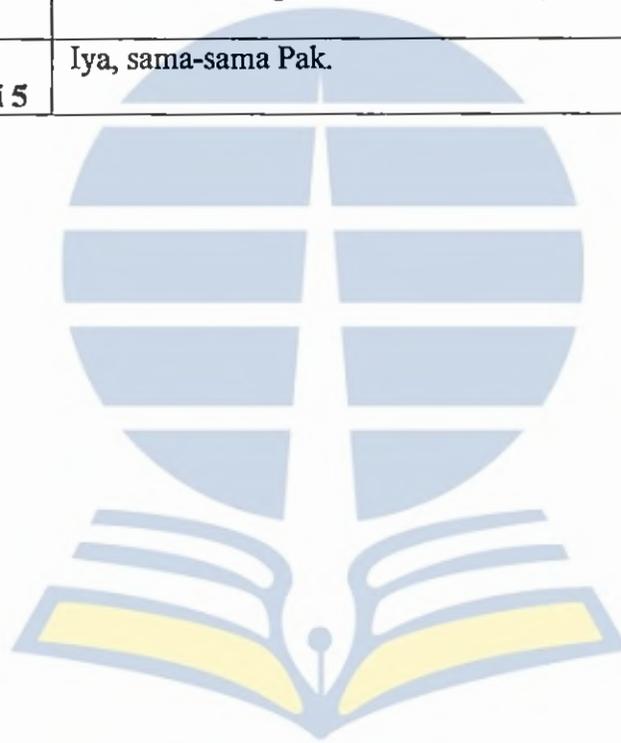
Satuan Kerja : Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Ibu Fery... Maaf Pak, mengganggu...
Informan Triangulasi 5	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh, Oh Pak Rudi, silahkan masuk, apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Terima kasih Bu, Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam rangka menyelesaikan studi S2 saya Bu.
Informan Triangulasi 5	Oh begitu, silahkan...
Peneliti	Baik, terima kasih....
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Berapa kali anda pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 5	Dua kali, 2015 dan 2016.
Peneliti	Apakah sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan

	<p>laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD sudah cukup memberikan pemahaman tentang SAP berbasis akrual tersebut? atau masih harus ditambah intensitasnya? Kira-kira berapa kali dalam satu tahun?</p>
Informan Triangulasi 5	<p>Menurut saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD masih kurang memberikan pemahaman karena dilakukan atau diselenggarakan hanya sekali dalam setahun. Setidaknya sosialisasi/bimbingan teknis tersebut diselenggarakan minimal dua kali dalam satu tahun anggaran.</p>
Peneliti	<p>Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?</p>
Informan Triangulasi 5	<p>Setahu saya, yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut adalah dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.</p>
Indikator Sumber daya	
Peneliti	<p>Kalau di Dinas Perikanan dan Peternakan, berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?</p>
Informan Triangulasi 5	<p>Tiga Orang, dan saya sebagai Bendahara Pengeluaran dari Dinas Perikanan dan Peternakan.</p>

Peneliti	Bagaimana pemahaman anda mengenai SAP berbasis akrual itu sendiri?
Informan Triangulasi 5	Belum begitu paham, masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual.
Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 5	Saya rasa cukup karena penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?
Informan Triangulasi 5	Cukup memadai.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana Ibu memotivasi diri sendiri dan personil pelaksana lainnya agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual SKPD ini?
Informan Triangulasi 5	Dengan cara bekerja sama, saling pengertian dan saling bantu membantu satu dengan yang lainnya.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan?
Informan Triangulasi 5	Tidak ada.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
Informan Triangulasi 5	Kami belum memiliki SOP terkait menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Triangulasi 5	Iya, sudah berjalan dengan baik karena pembagian tugas dan koordinasi tidak ada masalah. Ini yang saya rasakan.
Penutup	
Peneliti	Terima kasih Bu Fery atas kesempatan wawancara yang telah diberikan, semoga sukses selalu menyertai Ibu.
Informan Triangulasi 5	Iya, sama-sama Pak.



Lampiran 14

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN TRIANGULASI - 6**

Hari, Tanggal Wawancara : 24 Maret 2017

Nama Informan : Ferdy Ferdian, S.Kom

Jabatan : Kasubag Keuangan

Satuan Kerja : Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Pak Ferdy... Maaf Pak, mengganggu...
Informan Triangulasi 6	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh, Oh Pak Rudi, silahkan masuk, apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Terima kasih Pak, Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam rangka menyelesaikan studi S2 saya Pak.
Informan Triangulasi 6	Oh begitu, silahkan...
Peneliti	Baik, terima kasih....
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Berapa kali anda pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 6	Saya mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sudah kira-kira empat kali. Dua kali di Lubuklinggau yang diselenggarakan

	<p>oleh BPKAD Kota Lubuklinggau tahun 2015 dan 2016, dan dua kali lagi saya mengikuti di Jakarta pada tahun 2015 dan 2016 juga.</p>
Peneliti	<p>Apakah sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD sudah cukup memberikan pemahaman tentang SAP berbasis akrual tersebut? atau masih harus ditambah intensitasnya? Kira-kira berapa kali dalam satu tahun?</p>
Informan Triangulasi 6	<p>Menurut saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD belum bisa memberikan pemahaman kepada kawan-kawan pada entitas akuntansi karena diselenggarakan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran. Hendaknya sosialisasi/bimbingan teknis sejenis diselenggarakan sesering mungkin atau minimal per semester.</p>
Peneliti	<p>Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?</p>
Informan Triangulasi 6	<p>Kalau sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau narasumbernya dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. Namun sosialisasi/bimbingan</p>

	<p>teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis yang saya ikuti di Jakarta narasumbernya berasal dari Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga lain yang menyelenggarakan diklat terkait SAP berbasis akrual.</p>
<p>Indikator Sumber daya</p>	
Peneliti	<p>Kalau di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?</p>
Informan Triangulasi 6	<p>Tiga Orang, dan itu termasuk saya sebagai Kasubag. Keuangan.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pemahaman anda mengenai SAP berbasis akrual itu sendiri?</p>
Informan Triangulasi 6	<p>Walaupun saya sudah sering mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis tapi saya belum begitu paham, masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual. Ini mungkin karena saya bukan sarjana akuntansi, tapi saya merupakan sarjana komputer yang secara kebetulan ditugaskan sebagai Kasubag. Keuangan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.</p>
Peneliti	<p>Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?</p>
Informan Triangulasi 6	<p>Cukup, karena penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang seharusnya.</p>
Peneliti	<p>Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?</p>

Informan Triangulasi 6	Oh... sarana dan prasarana tersedia sangat memadai sekali.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana Ibu memotivasi diri sendiri dan personil pelaksana lainnya agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual SKPD ini?
Informan Triangulasi 6	Ya... bekerja sama, salaing menghormati, saling pengertian dan saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan?
Informan Triangulasi 6	Tidak ada.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?
Informan Triangulasi 6	SOP, kami belum pernah membaca maupun memilikinya.
Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Triangulasi 6	Iya, pembagian tugas dan koordinasi sejauh ini tidak ada masalah yang berarti semuanya dapat diatasi.
Penutup	
Peneliti	Terima kasih Pak Ferdy atas kesempatan wawancara yang telah diberikan, semoga sukses selalu menyertai Bapak.
Informan Triangulasi 6	Iya, sama-sama Pak Rudi.

**TRANSKRIP WAWANCARA
ANTARA PENELITI DENGAN INFORMAN TRIANGULASI - 7**

Hari, Tanggal Wawancara : 24 Maret 2017

Nama Informan : Sangsri Purba

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

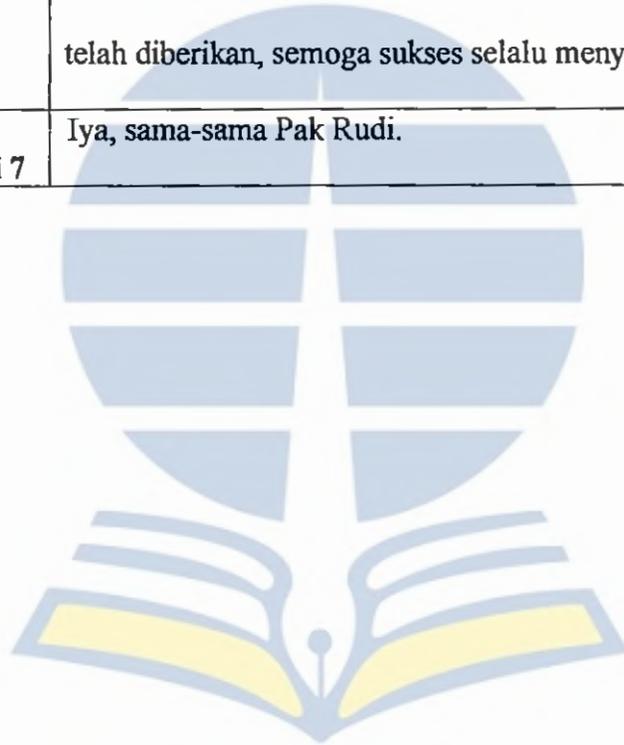
Satuan Kerja : Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Pembukaan	
Peneliti	Assalammu'alaikum Pak Purba... Maaf Pak, mengganggu...
Informan Triangulasi 7	Wa'ailaikummusalam waromatullahi wabarokatuh, Oh Pak Rudi, silahkan masuk, apa yang bisa saya bantu?
Peneliti	Terima kasih Pak, Saya bermaksud melakukan wawancara untuk keperluan tesis dalam rangka menyelesaikan studi S2 saya Pak.
Informan Triangulasi 7	Silahkan...
Peneliti	Baik, terima kasih....
Indikator Komunikasi	
Peneliti	Dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Berapa kali anda pernah mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 7	Saya mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis dua kali di Lubuklinggau yang diselenggarakan oleh BPKAD Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 dan 2016.

Peneliti	Apakah sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD sudah cukup memberikan pemahaman tentang SAP berbasis akrual tersebut? atau masih harus ditambah intensitasnya? Kira-kira berapa kali dalam satu tahun?
Informan Triangulasi 7	Kalau menurut saya sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini BPKAD masih perlu diperbanyak intensitasnya, agar bisa memberikan pemahaman yang lebih tentang SAP berbasis akrual.
Peneliti	Dari mana saja narasumber yang memberikan materi dalam sosialisasi atau bimbingan teknis tersebut?
Informan Triangulasi 7	Sosialisasi/bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan berbasis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau narasumbernya dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
Indikator Sumber daya	
Peneliti	Kalau di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, berapa jumlah personil untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?

Informan Triangulasi 7	Ya... Cuma kami ini, tiga orang, dan saya sebagai Bendahara Pengeluaran.
Peneliti	Bagaimana pemahaman anda mengenai SAP berbasis akrual itu sendiri?
Informan Triangulasi 7	Saya belum begitu paham, masih butuh belajar banyak lagi untuk memahami SAP berbasis akrual.
Peneliti	Apakah anggaran yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
Informan Triangulasi 7	Saya kira cukup.
Peneliti	Apakah fasilitas pendukung baik sarana dan maupun prasarana tersedia dan memadai?
Informan Triangulasi 7	Sarana dan prasarana tersedia dan secara memadai.
Indikator Disposisi atau sikap	
Peneliti	Bagaimana Ibu memotivasi diri sendiri dan personil pelaksana lainnya agar memiliki dedikasi untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual SKPD ini?
Informan Triangulasi 7	Bekerja sama, saling menghormati, saling pengertian dan saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya, seperti yang diungkap Pak Kasubag. Keuangan tadi.
Peneliti	Apakah ada insentif yang diberikan?
Informan Triangulasi 7	Tidak ada.
Indikator Struktur Birokrasi	
Peneliti	Apakah dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?

Informan Triangulasi 7	Belum, kami belum pernah membaca maupun memiliki SOP.
Peneliti	Apakah pembagian tugas dan koordinasi sudah berjalan dengan apa yang diinginkan?
Informan Triangulasi 7	Iya, pembagian tugas dan koordinasi sejauh ini berjalan dengan lancar..
Penutup	
Peneliti	Terima kasih Pak Purba atas kesempatan wawancara yang telah diberikan, semoga sukses selalu menyertai Bapak.
Informan Triangulasi 7	Iya, sama-sama Pak Rudi.



Lampiran 16

FOTO – FOTO PADA SAAT WAWANCARA





